

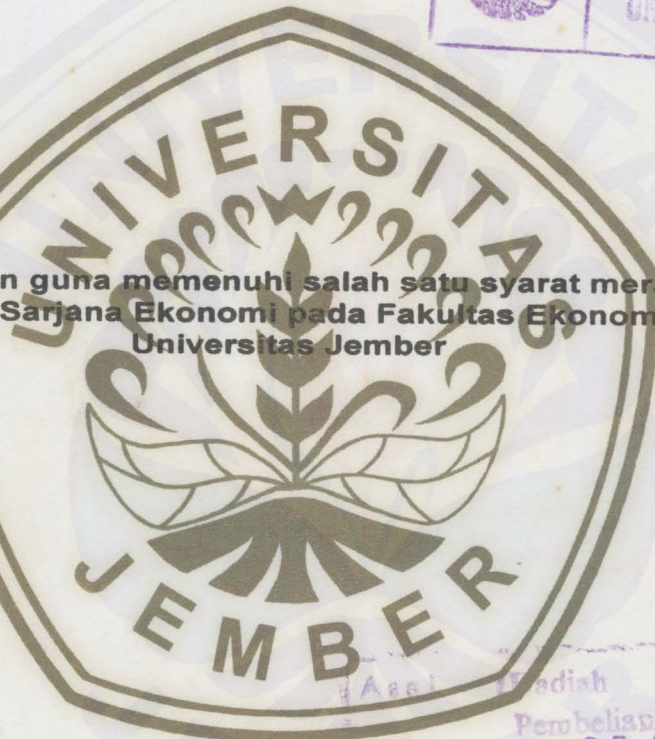
**ANALISIS POTENSI KOTA TULUNGAGUNG SEBAGAI
SENTRA INDUSTRI RAKYAT DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat meraih
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh :

Asal : Mediah
Perbelian
Terima : Tgl. 07 OCT 2003
No. Induk

Klass
3.30.642
FAR
a

MOHAMMAD FAROUQ

NIM. 990 810 101 230

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2003**

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS POTENSI KOTA TULUNGAGUNG SEBAGAI SENTRA
INDUSTRI RAKYAT DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : MOHAMMAD FAROUQ

N. I. M. : 990810101230

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

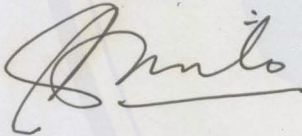
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

02 AGUSTUS 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

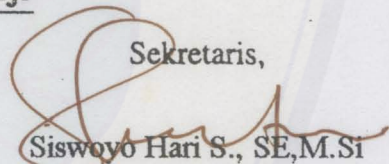
Ketua,



Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494

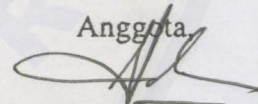
Sekretaris,



Siswoyo Hari S., SE, M.Si

NIP. 132 056 182

Anggota,



Drs. Moh. Adenan, MM

NIP. 131 624 477



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,



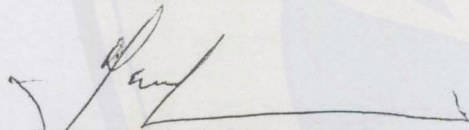
Drs. Liakip, SU

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

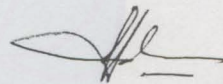
Judul Skripsi : Analisis Potensi Kota Tulungagung Sebagai Sentra
Industri Rakyat Di Kabupaten Tulungagung
Nama : Mohammad Farouq
NIM : 990810101230
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I,



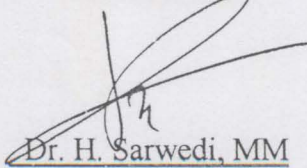
Prof. Drs. Abd. Heidar, M.Phil
NIP. 130345929

Pembimbing II,



Drs. M. Adenan, MM
NIP. 131996155

Ketua Jurusan



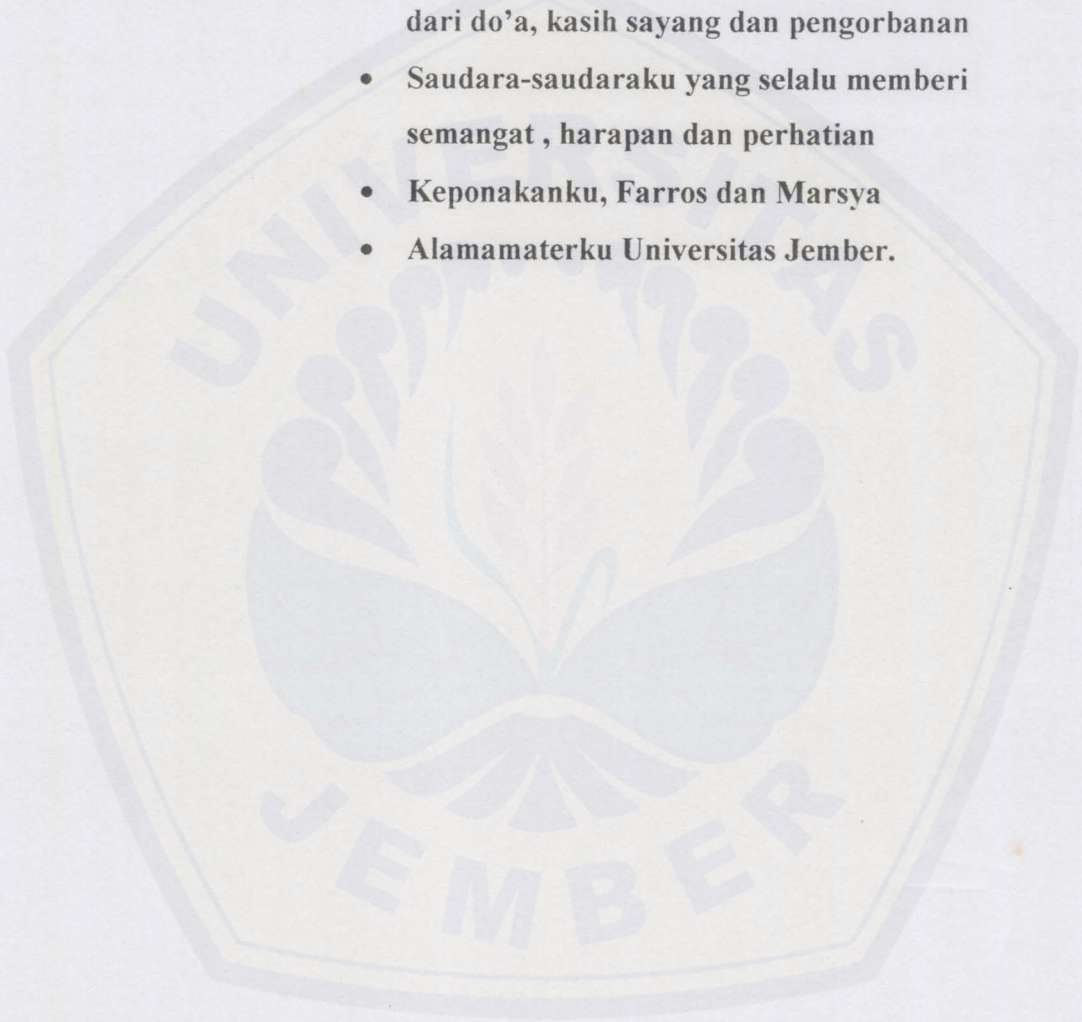
Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131276658

Tanggal Persetujuan : Juli 2003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Ibuku, yang tak pernah lepas dari do'a, kasih sayang dan pengorbanan
- Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat , harapan dan perhatian
- Keponakanku, Farros dan Marsya
- Alamamaterku Universitas Jember.



MOTTO

“ Usaha untuk mengerti bukan hanya kata-kata tetapi juga pribadi orang lain; mendengarkan dengan pikiran dan dengan hati ”

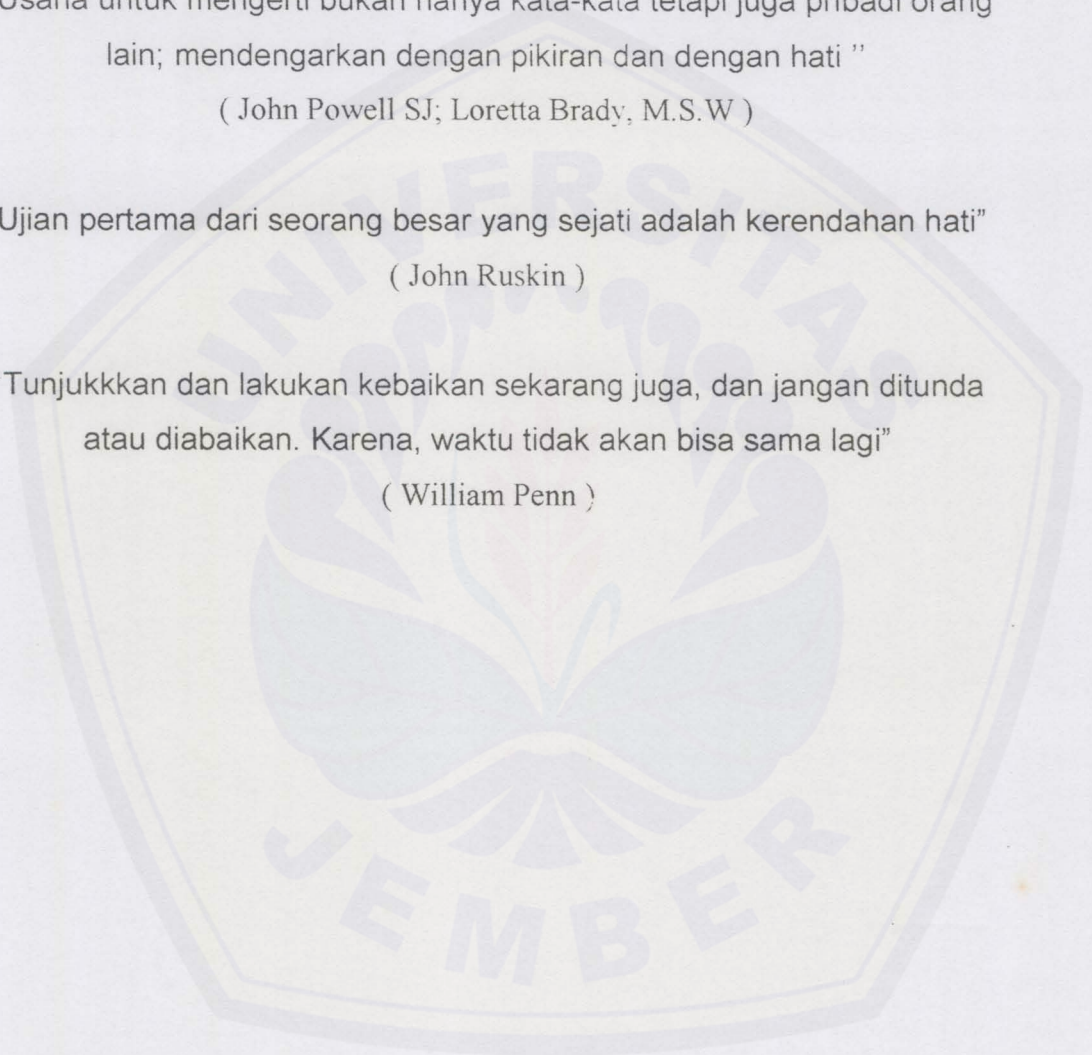
(John Powell SJ; Loretta Brady, M.S.W)

“Ujian pertama dari seorang besar yang sejati adalah kerendahan hati”

(John Ruskin)

“Tunjukkan dan lakukan kebaikan sekarang juga, dan jangan ditunda atau diabaikan. Karena, waktu tidak akan bisa sama lagi”

(William Penn)

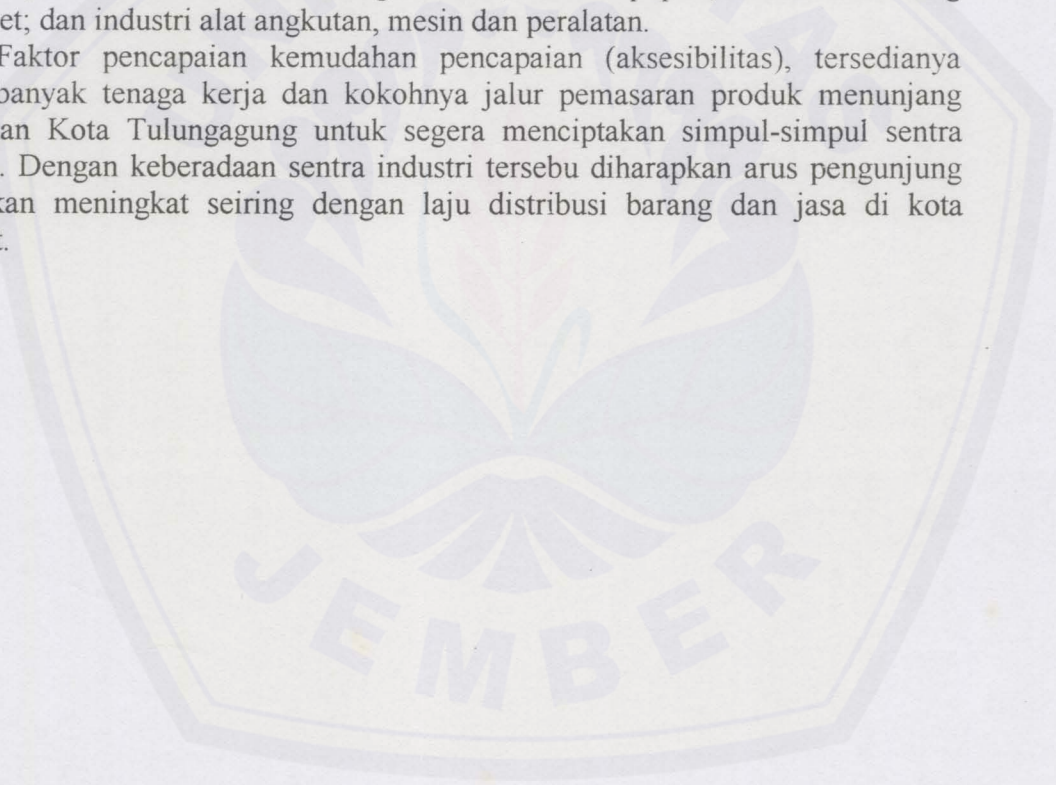


ABSTRAKSI

Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kota Tulungagung dapat ditingkatkan fungsi dan perannya sebagai cikal bakal sentra industri yang ada di seluruh wilayahnya. Survey lapangan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder baik dari Pemda Kabupaten Tulungagung maupun pihak kecamatan kota. Wawancara dilakukan ke beberapa pengrajin atau pelaku industri yang ada untuk mengetahui arah pemasaran dan distribusi produknya.

Dari pengolahan dan analisa data yang terkumpul, didapatkan bahwa Kota Tulungagung memiliki beberapa sektor industri unggulan, dimana diharapkan kota akan berkembang dengan lebih pesat atas peran industri tersebut. Jenis industri tersebut adalah industri barang lain; industri makanan, minuman dan tembakau; industri kertas dan barang cetakan; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; dan industri alat angkutan, mesin dan peralatan.

Faktor pencapaian kemudahan pencapaian (aksesibilitas), tersedianya cukup banyak tenaga kerja dan kokohnya jalur pemasaran produk menunjang kelayakan Kota Tulungagung untuk segera menciptakan simpul-simpul sentra industri. Dengan keberadaan sentra industri tersebut diharapkan arus pengunjung kota akan meningkat seiring dengan laju distribusi barang dan jasa di kota tersebut.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Kota Tulungagung Sebagai Sentra Industri Rakyat Di Kabupaten Tulungagung” dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukunagan dan masukan positif dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada :

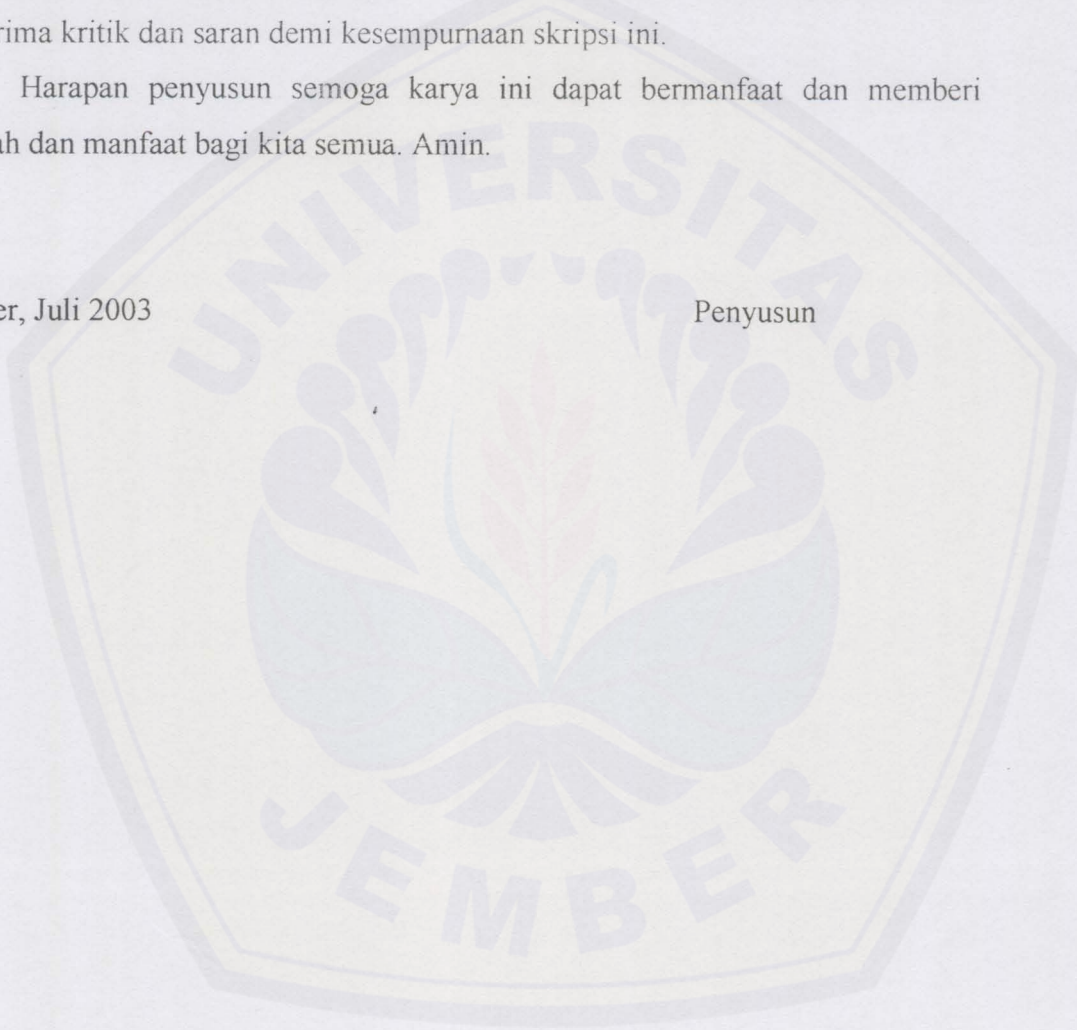
1. Bapak Prof. Drs. Abd. Heidar, M. Phill dan Bapak Drs. M. Adenan, MM, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, dan mengoreksi dalam penyusunan skripsi;
2. Bapak Drs. Liakip, SU, selaku Dekan Fakultas Ekonomi;
3. Bapak Dr. Sarwedi, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ibu Dra. Hj. Riniati, MP, selaku dosen wali;
5. seluruh pegawai dan staff Pemda Kabupaten Tulungagung, Kantor BPS Kabupaten Tulungagung dan Kantor Kecamatan Kota Tulungagung;
6. Bangun Surya Seputra, atas semua bantuannya selama ini;
7. drg. Yus Arlika Putra Wibawa atas pinjaman printernya;
8. Teman-teman Kost-kostan “Borju” (Arik, Hendra, Doni, KP, Andre, dan Cak Agus), atas dukungan dan kebersamaannya;
9. Teman-teman FKMT atas dukungannya;
10. Teman-teman angkatan '99 IESP/GP Fakultas Ekonomi Universtas Jember dan teman-teman di Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Industri, buat kebersamaan dan segala informasinya;

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penyusun siap menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga karya ini dapat bermanfaat dan memberi hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, Juli 2003

Penyusun



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
TANDA PERSETUJUAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	4
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
I.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
I.3.2. Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PENELITIAN.....	5
2.1. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	5
2.2. Landasan Teori.....	7
2.2.1. Industri.....	7
2.2.2. Tenaga Kerja.....	8
2.2.3. Perencanaan Regional.....	10
2.2.4. Teori Pusat Pertumbuhan.....	13
2.2.5. Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah.....	15
2.2.6. Konsep Analisa Location Quotient.....	17
2.2.7. Konsep Teori Indeks Aksesibilitas.....	18
III. METODE PENELITIAN.....	20
3.1. Rancangan Penelitian.....	20

3.3. Metode Analisis Data.....	20
3.4. Definisi Operasional.....	22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1. Gambaran Umum.....	23
4.1.1. Keadaan Geografis.....	23
4.1.2. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja.....	26
4.1.3. Jenis Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga.....	27
4.1.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tulungagung.....	30
4.2. Hasil Analisis.....	32
4.2.1. Analisis Penentuan Penilaian Terhadap Pusat Pengembangan.....	32
4.2.2. Analisa Tingkat Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Tulungagung melalui pendekatan LQ (Location Quationt)	36
4.3. Pembahasan.....	40
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1. Kesimpulan.....	44
5.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Wilayah Administrasi Kota Tulungagung Tahun 2002.....	25
Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 1998–2002.....	26
Tabel 3. Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2001.....	29
Tabel 4. Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	35
Tabel 5. Perhitungan LQ 2001 Terhadap Jumlah dan Jenis Unit Usaha	38
Tabel 6. Perhitungan LQ 2001 Terhadap Tenaga Kerja Industri.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perhitungan Analisa Indeks Aksesibilitas Di Kabupaten Tulungagung	47
Lampiran 2. Jarak Terdekat Antar Ibu Kota Kecamatan	48
Lampiran 3. Kondisi Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tulungagung Tahun 1999 – 2002.....	49
Lampiran 4. Analisis Pertumbuhan Relatif Kota Per Kecamatan.....	50
Lampiran 5. Perhitungan LQ Terhadap Jumlah dan Jenis Unit Usaha	51
Lampiran 6. Perhitungan LQ Tenaga Kerja Industri Kecil / Kerajinan RT.	59



I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Didalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 telah disebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat memerlukan pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan diseluruh daerah perlu ditingkatkan terutama dikawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya berdasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. (*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999; 16*)

Pembangunan regional juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Permasalahan pembangunan regional timbul karena adanya keterbatasan potensi sumber daya, penyebaran sumber daya yang tidak merata serta jumlah penduduk yang makin bertambah. Kebijakan pembangunan untuk masing-masing wilayah yang lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan potensi pembangunan pada masing-masing wilayah perlu dilaksanakan (*Nursyaman, 1996 : 239*). Oleh karena itu perlu disusun suatu perencanaan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka untuk mencapai tujuan maupun dalam memilih kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sangat perlu untuk menghindari inkonsistensi dalam suatu perencanaan.

Perencanaan pembangunan regional adalah suatu proses strategi

proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional supaya terjadi perkembangan kearah tujuan yang dikehendaki (*Kadariah, 1997 : 3*). Masing-masing tujuan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu pertentangan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam perencanaan juga perlu adanya penentuan prioritas tujuan sesuai dengan karakteristik dan keadaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud adalah daaerah perencanaan atau daerah administrasi dimana pengelompokannya berdasarkan pada kesatuan administrasi tertentu dalam suatu negara, seperti Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (*Arsyad, 1997 : 274*).

Sasaran pembangunan jangka panjang bidang ekonomi adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelita yang terdahulu mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat banyak serta untuk menciptakan landasan bagi Repelita berikutnya. Maka struktur ekonomi yang seimbang itu akan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Pelita yang ada. Dengan peningkatan bidang industri dan pertanian secara bertahap akan terpenuhi kebutuhan pokok rakyat dan tercapailah struktur ekonomi yang seimbang, ialah struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat.

Di Indonesia proses industrialisasi lebih dimantapkan untuk mendukung berkembangnya sektor industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. Pembangunan di bidang industri ditujukan untuk membuat sektor industri menjadi lebih efisien dan peranannya didalam perekonomian nasional makin meningkat baik dari segi nilai tambah maupun lapangan pekerjaan. Industrialisasi pada hakekatnya merupakan proses pembangunan masyarakat industri menyangkut peningkatan kualitas serta pendayagunaan potensi manusia Indonesia. Sehingga peranan pendidikan serta pembaharuan tata nilai masyarakat dan pranata sosial menjadi sangat penting.

Pada dasarnya pembangunan bidang industri ditujukan untuk

menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan ekspor dan menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan sektor pembangunan lainnya, serta sekaligus mengembangkan penguasaan teknologi. Untuk itu perlu pendayagunaan sebaik-baiknya sumber daya manusia, sumber daya alam, energi sumber dana termasuk devisa serta teknologi yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan masing-masing, hal tersebut perlu didukung oleh peningkatan efisiensi serta pengembangan iklim usaha dan iklim investasi yang sehat.

Dalam melaksanakan pembangunan industri perlu diusahakan agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi makin kokoh dengan mempererat keterkaitan antara sektor industri dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Demikian perlu pula dikembangkan keterkaitan yang menguntungkan dan saling menunjang antara industri kecil, industri menengah, industri besar serta antara industri hilir, industri antara, dan industri hulu.

Salah satu cara yang tepat untuk mengembangkan suatu industrialisasi adalah dengan membuat suatu pengembangan kawasan sentra di berbagai daerah yang digunakan untuk suatu pusat pengembangan industri rakyat dalam lingkup kawasan tersebut. Pengembangan sentra industri rakyat ini harus terus dipacu dan dikembangkan oleh berbagai daerah, karena hal ini tidak lepas dari keberadaan sentra industri itu sendiri yang dapat menciptakan suatu perekonomian baru, dimana hal ini akan mampu menyerap para investor (pengunjung), seiring dengan laju distribusi barang dan jasa di daerah. Untuk hal tersebut diperlukan suatu studi untuk melihat seberapa besar potensi daerah dapat berkembang atau seberapa jauh kesiapan daerah untuk dapat berkembang sebagai suatu sentra industri.

Ada beberapa faktor yang perlu dikembangkan dalam studi pengembangan daerah, antara lain tinjauan atas kelengkapan fasilitas, kemudahan aksesibilitas dan juga pertumbuhan relatif daerah dari tahun ke tahun. Disamping itu perlu dilakukan analisa terhadap kendala perkembangan daerah yaitu kondisi fisik daerah itu sendiri. Studi itu tidak lepas dari segi fungsi dan peran daerah itu

pula melihat potensi dari luar daerah tersebut yaitu pengaruh perkembangan industri dan perdagangan daerah-daerah sekitarnya.

I.2. Perumusan Masalah

Apabila ditinjau dari latar belakang permasalahan maka kita dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah suatu daerah dapat dinyatakan layak sebagai suatu sentra pengembangan industri rakyat ?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa jauh Kota Tulungagung dapat ditingkatkan sebagai basis pengembangan sentra industri rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

I.3.2 . Manfaat Penelitian.

1. sebagai bahan informasi bagi pihak berkepentingan yang berupa instansi pemerintah dan pihak terkait untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. sebagai informasi bagi peneliti lain yang berminat terhadap permasalahan pembangunan ekonomi dan perencanaan daerah



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa studi telah pengembangan sentra industri rakyat telah dilakukan oleh para peneliti. Seperti yang tertuang dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu sosial (Social Sciece) Vol. 10 No.1, Februari 1998 mengenai *Studi Pengembangan Sentra Industri Rakyat Di Kota Ngunut, Kabupaten Dati II Tulungagung* oleh Heru Sufianto, Wahid Hasyim dan Surjono. Dimana analisa yang dipakai adalah menggunakan pendekatan wilayah dan kota, Analisa ini berfungsi untuk menentukan :

1. tingkat kelayakan suatu daerah sebagai suatu sentra pengembangan industri rakyat. Dalam hal ini ditentukan desa-desa pusat pengembangan (DPP) dalam sektor industri yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam menentukan penilaian terhadap pusat pengembangan ini dilakukan evaluasi terhadap :
 - a. kelengkapan fasilitas berdasarkan Standart Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI) 1987
 - b. aksesibilitas
 - c. jumlah penduduk (tenaga kerja sektor industri, melalui tingkat prosentase jumlah tenaga kerja disektor industri yang tersebar disuatu daerah)
 - d. pertumbuhan relatif kota. Hasil yang didapat bisa dipetakan dan dapat dipakai sebagai alat cross check terhadap kebijakan yang tertuang dalam RUTRK.
2. tingkat perkembangan industri daerah melalui pendekatan LQ (location quotient), analisa ini dilakukan dalam dua cara :
 - a. dilihat dari jumlah tenaga kerja
 - b. dilihat dari jumlah dan penyebaran unit industri yang ada.

Dari dua analisis diatas juga akan diketahui jenis-jenis industri yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan industri padat modal. Dari analisa dan pembahasan yang dilakukan menghasilkan kesimpulan antara lain :

1. Kota Ngunut ternyata memiliki potensi untuk diangkat sebagai suatu sentra industri baru untuk menampung dan mendistribusikan barang produk

2. jenis industri yang memungkinkan untuk dibuatkan sentra industri adalah industri tenun, logam dan bahan makanan.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan studi lebih mendalam tentang kelayakan lokasi dimana sentra industri tersebut ditempatkan. Tentunya akan banyak faktor pengaruh yang terlibat, diantaranya jenis polutan industri, kondisi fisik kota serta peraturan daerah yang ada (Rencana Pengembangan Wilayah IKK Ngunut dalam RUTRK dan RDTRK). Perangkat sentra industri Ngunut hendaknya didukung oleh perangkat hukum serta kebijakan-kebijakan dalam upaya menstimulasi perkembangan industri lebih cepat, seperti halnya pemberian ijin fasilitas industri, pembinaan lebih intensif terhadap beberapa “home industry “ serta pengadaan fasilitas infrastruktur perkotaan.

Studi yang berkaitan dengan masalah tersebut juga pernah dilakukan oleh Lilis Robiatin yaitu mengenai *Implementasi Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan Pembangunan Di Satuan Wilayah Pembangunan VIII Madiun Tahun 1993/1996*. Dimana dalam penelitian tersebut menyimpulkan :

1. selama kurun waktu 1993-1996 hasil perhitungan penyusunan total pertumbuhan ekonomi Dati II Madiun sebesar 40,44% (Daerah Maju), Kabupaten Ngawi -7,63% (Lamban), Kabupaten Ponorogo -9,98% (lamban), Kabupaten Magetan -13,87% (lamban) dan Kabupaten Pacitan -20,26% (Lamban).
2. rata-rata tingkat kesenjangan pendapatan wilayah SWP VIII Madiun 0,63417 tergolong besar dibandingkan tingkat kesenjangan Jawa Timur sebesar 0,13712. Tingkat kesenjangan terkecil pada Kabupaten Ponorogo 0,58487 dan paling besar pada Kabupaten Magetan sebesar 0,69532.
3. implementasi pembangunan di SWP VIII Madiun sangat diperlukan pusat pertumbuhan sebagai spread effect bagi wilayah sekitar dengan mengembangkan sektor industri, untuk membuka peluang bagi investor dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selain itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur berupa

antar daerah. Pengembangan transportasi diarahkan pada daerah terbelakang dan terpencil, tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama Kabupaten Pacitan untuk menghubungkan antar kecamatan.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Industri

Industri adalah kumpulan yang menghasilkan produk yang homogen misalnya industri modal, industri sepeda motor, industri rokok, minuman, dan sebagainya. (*Hasibuan, 1987:12*)

Pembangunan industri di Indonesia diarahkan agar sektor industri terdapat keseimbangan antara industri besar dan industri kecil, antara industri padat modal dan industri padat karya. Penggalakan industri yang berorientasi ekspor, terutama industri kecil / rakyat yang padat karya yang tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk sebagian waktu. Dimana hal ini dapat membantu keluarga-keluarga petani (khususnya), untuk menambah pendapatan devisa dan meningkatkan efisiensi industri kecil dan daya saing industri yang lebih besar.

Dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi, terutama yang akan dilaksanakan dengan industrialisasi dibutuhkan kapital yang tidak sedikit, khususnya bagi negara yang sedang berkembang, yang dalam pembangunan perekonomiannya selalu membutuhkan perlengkapan kapital yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan kelompok yang sedang berkembang belum dapat membuat sendiri alat-alat kapital sehingga masih didatangkan dari negara yang lebih maju. Akan tetapi impor alat-alat modal yang diperlukan itu sering tidak dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan karena tidak stabilnya pendapatan yang diperoleh.

Dalam rangka problema yang dihadapi negara sedang berkembang, yaitu untuk pengembangan sektor industri maka diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi pada peningkatan jumlah macam barang yang diekspor. Selain itu juga meminimalisasi barang-barang impor dengan mengembangkan substitusi

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang diderita oleh negara yang sedang berkembang, yaitu di bidang memperoleh pendapatan devisa.

Secara garis besar jenis-jenis industri yang tengah di dorong pengembangannya dapat digolongkan sebagai berikut :

1. industri untuk pemenuhan kebutuhan rakyat sebagian besar dicakup dalam angka industri dan pembangunannya akan terus dimantapkan sehingga produk-produk industrinya dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat secara keseluruhan
2. industri yang menghasilkan mesin-mesin industri beserta industri yang dapat menyediakan pengadaan bahan baku dan penolong yang diperlukan sebagian besar yang dicakup dalam industri mesin dan dasar logam
3. industri yang memanfaatkan sumber alam dan energi sebagian besar dicakup dalam industri kimia dasar dengan mengandalkan keunggulan komparatif yang dimiliki
4. industri kerajinan rakyat yang penting perannya dalam mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja dalam pembangunan masyarakat industri modern

Industri berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi :

- a. makanan, minuman dan tembakau
- b. tekstil, pakaian jadi dan kulit
- c. kerajinan rumah tangga
- d. kertas dan barang cetakan
- e. pupuk, kimia dan barang dari karet
- f. semen dan barang galian non logam
- g. logam dasar, besi dan baja
- h. alat angkutan, mesin dan peralatan
- i. barang lainnya.

2.2.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang terpenting dan perlu

dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja. Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun perekonomian. Penduduk memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi karena penyediaan tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan dan usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Penduduk selain sebagai pengembang teknologi dan mengorganisasi penggunaan berbagai fasilitas produksi, jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Jumlah penduduk yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan perkapita. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja akan digunakan juga untuk menentukan proses pembangunan ekonomi karena tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga juga distribusi barang barang dan jasa.

Penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi barang dan jasa mempunyai dua macam nilai ekonomi, yaitu (Suroto, 1992 : 16) :

1. dengan tenaga yang disumbangkan, input lain berupa modal, bahan, energi dan informasi dapat diubah menjadi output atau produk yang mempunyai nilai tambah
2. penggunaan tenaga kerja juga memberikan pendapatan kepada orang yang melakukan pekerjaan dan memungkinkan penyumbang input lain memperoleh pendapat.

Beberapa ahli banyak yang memberikan pengertian tenaga kerja diantaranya ialah Swasono (1987 : 20) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Simanjutak (1985 : 2) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan sedang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah untuk menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Suroto (1992 : 17 – 19) pengertian umum tenaga kerja (man power)

menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam pasar kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan sedangkan pekerjaan adalah kegiatan manusia untuk memperoleh pendapatan.

Batas umur banyak dipakai untuk mengkategorikan penduduk sebagai tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang berumur minimal 10 tahun atau lebih dan tidak ada batas umur maksimal. Penentuan batas umur ini sesuai dengan realita yang terjadi di Indonesia. Anak-anak pada usia 10 tahun sudah banyak yang bekerja sementara tidak ada batas umur maksimal untuk tenaga kerja yang bekerja, karena fakta yang terjadi di Indonesia penduduk yang seharusnya sudah menikmati masa pensiunan masih terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagai akibat dari tidak terdapatnya jaminan di hari tua.

Tenaga kerja yang diserap di sektor industri kecil pada umumnya adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi maupun memiliki ketrampilan khusus, hal ini disebabkan sektor industri kecil tidak menuntut persyaratan pengetahuan teknis atau ketrampilan yang tinggi bagi tenaganya, karena alat-alat produksi yang digunakan relatif sederhana. Industri kecil dalam proses produksi banyak melibatkan tenaga manusia sehingga dapat dikatakan industri ini bersifat padat karya.

2.2.3. Perencanaan Regional

Ilmu Ekonomi Regional pada mulanya muncul pada pertengahan tahun 1950 sebagai suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi. Ilmu ini muncul karena adanya kekhususan yang menyebabkan telah berkembangnya suatu bidang spesialisasi yang baru dan berdiri sendiri.

Pada dasarnya ilmu ini muncul karena pada ekonomi tradisional mengabaikan konsep tempat (space) dalam analisis. Dalam perencanaan sektoral, dirumuskan kebijaksanaan dan program-program pembangunan tanpa memperhatikan dimana kegiatan tersebut dapat dilakukan.

Perbedaan pokok ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi konvensional terletak dalam perlakuan terhadap dimensi spasial.

Dalam ekonomi dimensi waktu mempunyai posisi sentral dan harga waktu dicerminkan melalui tingkat bunga. Di lain pihak dimensi spasial diperlukan hanya secara eksplisit. Sebaliknya bagi seorang peneliti bidang ilmu ekonomi regional, dimensi spasial atau jarak memegang posisi kunci sehingga biaya pengangkutan merupakan “harga” yang sangat penting untuk diperhitungkan secara eksplisit dalam analisis (*Iwan Azis, 1994 : 58*).

Dalam penerapan konsep wilayah (region) terdapat 3 (tiga) konsep wilayah yang lazim digunakan. Pertama, homogenous region yaitu pengelompokan beberapa daerah yang memiliki karakteristik yang sama baik merupakan kepadatan penduduk, problema sosial dan lain sebagainya. Kedua, nodal region, yaitu pengelompokan beberapa daerah yang mempunyai keterikatan satu sama lainnya berupa kepadatan penduduk, problema sosial dan lain sebagainya. Ketiga, planning region, yaitu pengelompokan beberapa daerah berdasarkan kesatuan politik atau administrasi, sehingga konsep ini juga dikenal dengan administrasi regional. (*Richardson, 1991 : 5*).

Wilayah nasional dianggap terlalu luas untuk mengadakan rencana pembangunan komprehensif, dimana diadakan hubungan yang erat antara rencana sektor yang satu dengan yang lain. Dalam pendekatan ini perencanaan diperkecil, artinya wilayah dibagi dalam beberapa daerah perencanaan yang dapat berupa daerah administratif, misalnya propinsi atau kabupaten, dapat pula satu pulau atau daerah yang menyangkut wilayah yang lebih luas daripada propinsi (*Kadariah, 1972 :4-5*). Pada kenyataannya, dalam perencanaan pembangunan regional digunakan definisi daerah sebagai daerah administrasi. Hal ini terjadi selain karena struktur yang mengharuskan demikian, juga untuk memudahkan perolehan data sehingga mudah pula untuk menerapkan suatu strategi pembangunan di daerah yang bersangkutan. Karenanya, gambaran komprehensif tentang daerah penting bagi perencanaan regional.

Pentingnya perencanaan regional bukan hanya untuk kepentingan

Myrdal menyatakan bahwa perkembangan yang tidak merata dapat menimbulkan “ backwash effect “, yaitu menaikkan tenaga kerja dan modal yang diperlukan ke tempat yang mulai dibangun, sehingga daerah lain di sekitarnya menjadi mundur dan terbelakang. Segala tindakan pembangunan harus ditujukan untuk untuk melaksanakan “ spread effect “, yaitu berupa pengaruh yang menguntungkan karena adanya perluasan aktivitas dari pusat pembangunan ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya, baik karena lakunya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan sebagainya.

Karenanya perlu diusahakan perencanaan regional yang lengkap dan menunjang perencanaan pembangunan nasional. Disini direncanakan secara serasi sesuai dengan kegiatan usaha nasional yang ada di daerah berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati serta kegiatan daerah itu sendiri secara komplementer. Dalam rangka perencanaan regional terdapat gagasan bahwa masing-masing daerah (region) mempunyai fungsi khusus dalam rangkaian pembangunan nasional. Indikator pembangunan daerah sama dengan indikator pembangunan nasional. Pembangunan regional juga harus memperhatikan pertumbuhan sebagai evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan. *Glasson* (1977 : 98) menyatakan bahwa pertumbuhan pada perekonomian regional sebagai suatu proses dari pembangunan nasional harus melalui beberapa tahap antara lain :

1. tahap perekonomian subsistem swasembada, dimana hanya terdapat sedikit investai atau perdagangan. Lapisan penduduk mengandalkan sektor pertanian yang merupakan potensi basis menurut klasifikasi sumber daya alamnya.
2. adanya kemajuan pengangkutan daerah mengembangkan perdagangan dan spesialisasi, maka muncul lapisan (penduduk) kedua yang mengusahakan industri desa yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Pada mulanya semua bahan baku, tenaga kerja dan pasar disediakan oleh penduduk petani, sehingga lapisan baru ini berevolusi pada tempat yang berkaitan dengan lapisan basis.
3. seiring bertambahnya perdagangan interregional, daerah tersebut mengalami

ternak yang ekstensif ke tanaman biji-bijian dan peternakan intensif serta tanaman buah-buahan .

4. semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya hasil pertanian, menyebabkan industri sekunder berkembang, yang mula-mula mengolah produk pertanian kemudian berspesialisasi .
5. perkembangan industri tersier yang memproduksi untuk ekspor .

Selanjutnya ia menyatakan bahwa untuk mempercepat proses pertumbuhan perlu ditingkatkan kegiatan spesialisasi dan perdagangan interregional yang merupakan motor pertumbuhan dalam pembangunan.

Pada lingkup yang lebih besar, daerah tak lepas dari permasalahan kemampuan dan kebutuhan akan barang-barang yang perlu dan dapat memicu pembangunan, dimana sebagian diperoleh dari luar daerah dengan jumlah yang besar daripada dalam daerah. Untuk itu daerah perlu berspesialisasi agar mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan mengekspor ke daerah lain. Pemilihan spesialisasi ini harus berdasarkan potensi dan sumber daya yang terdapat di suatu daerah untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga akan muncul sektor prioritas yang disebut juga sebagai sektor basis (*Arsyad, 1993 : 137*).

2.2.4 Teori Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan tidak hanya merupakan lokalisasi dari industri-industri inti. Pusat pertumbuhan harus juga mendorong ekspansi yang besar di daerah sekitar, karenanya efek polarisasi strategik adalah lebih menentukan daripada perkaitan-perkaitan antar industri. Prasarana yang sudah sangat berkembang, penyediaan pelayanan-pelayanan sentral, permintaan terhadap faktor-faktor produksi dari daerah pengaruh dan persebaran kesadaran pertumbuhan serta dinamisme ke seluruh daerah pengaruh, kesemuanya ini penting untuk mendorong polarisasi (*Richardson, 1991 :85*).

Menurut Perraoux (*dalam Glasson, 1990:170*), (1) pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat dan tidak terjadi serentak; (2) pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-

terhadap keseluruhan perekonomian. Menurut teori ini daerah yang akan tumbuh cepat adalah daerah yang merupakan pusat pertumbuhan atau pengembangan, sedangkan daerah lainnya akan tetap jauh tertinggal dalam segala bidang.

Boudenville (*dalam Glasson, 1996 :243*), mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai kelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruh daerah pengaruhnya.

Gunnar Myrdall (*dalam Nursyaman, 1996:243*), mengemukakan bahwa tempat-tempat yang akan menarik adalah tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian sehingga daerah ini memiliki keuntungan komparatif dibandingkan daerah lainnya. Myrdall menekankan analisisnya pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan di berbagai daerah yaitu timbulnya backwash effect dan spread effect. Daerah yang maju akan berkembang lebih cepat daripada daerah yang kurang maju karena faktor-faktor yang menimbulkan spread effect ke daerah yang lebih miskin.

Pertumbuhan kota masih merupakan hal yang belum dikembangkan dalam bidang ekonomi perkotaan dan ekonomi regional karena proses pertumbuhan kota sangat kompleks. Teori pertumbuhan kota yang paling terkenal adalah teori tempat sentral yang diperkenalkan oleh Christaller pada tahun 30-an. Menurut teori ini, tingkat permintaan pelayanan kota di daerah pelayanannya (*service area*) menentukan cepatnya tempat-tempat sentral berkembang. Teori tempat sentral dapat dianggap teori umum dimana fungsi kota adalah sebagai pusat pelayanan untuk wilayah sekelilingnya. Ambang permintaan (*demand threshold*) dan daerah pasar suatu barang atau jasa (*range*) adalah dua konsep kunci yang menentukan mengapa barang dan jasa tertentu ditawarkan hanya secara sentral oleh pusat. Ambang permintaan mencerminkan ekonomi skala dan aglomerasi.

Konsep dasar teori kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai berikut (*Nursyaman, 1996:243*) :

1. konsep leading industries dan perusahaan-perusahaan propulsif, menyatakan pada pusat pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan yang propulsif dan besar yang termasuk dalam leading industries yang mendominasi unit ekonomi lainnya.
2. konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leading industries mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan.
3. konsep spread effect menyatakan bahwa pada waktu kualitas propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang sekitarnya. spread effects dikenal juga dengan trickle down effects.

2.2.5 Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah

Kehidupan bangsa pada dasarnya selalu berkembang, untuk itu perlu dijamin berlangsungnya pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan suatu bangsa menuntut diterapkannya pola-pola efisiensi pada segenap kegiatan usaha, baik yang tergolong dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Konsep pengembangan wilayah nasional menuntut diterapkannya tujuan-tujuan : (1) memperkokoh keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya ; (2) memperkokoh kesatuan ekonomi nasional ; dan (3) memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan berkelakuan searah dengan konsep pengembangan wilayah (*Hadjisaroso, 1990:2*).

Konsep pengembangan wilayah memerlukan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi serta merata mendorong suatu daerah untuk memperkokoh kesatuan ekonomi nasional. Keseimbangan antar daerah akan memperkokoh ekonomi nasional, secara tidak langsung akan terpelihara pertumbuhan nasional yang efisien (*Hadjisaroso, 1990:2*).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dalam konsep pengembangan wilayah dapat ditingkatkan dengan pemilihan lokasi yang dinilai paling menguntungkan antara yang menghasilkan barang atau jasa, hal ini tidak

berkelompoknya kegiatan usaha tetap merupakan langkah yang menguntungkan, dan (b) kegiatan usaha penghasil jasa mudah menyesuaikan diri, sehubungan dengan cirri-ciri pelayanannya, yaitu yang berjangkauan lokal maupun berorientasi kedalam saja (*Hadjisaroso, 1994:4*).

Konsep Pengembangan Wilayah Regional mendefinisikan suatu wilayah, yaitu sebutan untuk lingkungan permukaan bumi pada umumnya dan tentu batasnya. Untuk lebih menyederhanakan pengertian wilayah, dibagi wilayah nasional dan wilayah daerah regional. Wilayah nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara. Daerah regional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah batas propinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan dan desa. Wilayah nasional terbagi dalam daerah-daerah, dalam pelaksanaannya menerapkan kebijakan nasional melalui proses pengaturan pemerintah daerah regional (*Hadjisaroso, 1990:8*).

Realisasi dari kebijakan pembangunan tersebut dibentuklah wilayah-wilayah pembangunan (SWP) yang dikelompokkan berdasarkan perbatasan daerah dengan memperhatikan pengaruh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi akan digantikan pengaruh dari pusat lainnya. Satuan Wilayah Pembangunan merupakan berbagai jenis kegiatan yang tercakup dalam sektor pemerintah maupun masyarakat dan pelaksanaannya diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat melalui proyek pengembangan antar sektor, pada satu atau lebih daerah dalam satu wilayah pembangunan. SWP ini dibagi dalam Sub satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) yang menghubungkan beberapa daerah untuk membentuk kegiatan hubungan tiap sektor ekonomi. Dengan adanya SSWP diharapkan tingkat pertumbuhan antar wilayah pembangunan dapat ditingkatkan (*Sukirno, 1982 : 2*).

Pengaruh besar adanya kebijakan SSWP ini akan tercapai kesempatan untuk tumbuh kegiatan-kegiatan usaha lebih tinggi. Kebijaksanaan SSWP bertujuan untuk mencapai kemudahan-kemudahan pengembangan suatu daerah serta mewujudkan keseimbangan antar daerah untuk lebih efektif dan efisien

Pengembangan SSWP terjadi oleh pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pengembangan kedua jenis sumber daya berlangsung sedemikian rupa, sehingga menimbulkan arus barang, akan makin besar pula kesempatan terbuka untuk pertumbuhan modal. Luas jangkauan arus barang yang ditentukan oleh tinggi nilai ataupun nilai tambah pada barang. SSWP memungkinkan arus barang antar daerah lebih berkembang, karena menghubungkan antar daerah (*Hadjisaroso, 1990:2*).

2.2.6. Konsep Analisa Location Quotient

Salah satu alat untuk analisa untuk menganalisa peranan sektor pembangunan dalam suatu daerah adalah dengan mengamati location quotient (LQ), yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan “kekuatan” atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain.

Analisis Location Quotient dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan sektor atau subsektor dalam kegiatan ekonomi di daerah. Jika suatu sektor atau sub sektor memiliki $LQ > 1$, maka sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor atau subsektor potensial dan akan mengekspor produknya keluar daerah dan sektor atau subsektor tersebut dapat digunakan sebagai leading sektor, karena sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya jika sektor atau subsektor memiliki nilai $LQ < 1$ maka sektor atau subsektor tersebut lemah dengan kata lain daerah tersebut mengimpor produk dari sektor atau subsektor tersebut.

Asumsi yang digunakan dalam analisis LQ adalah:

1. permintaan daerah akan suatu barang pertama-tama dipenuhi dari hasil daerah itu sendiri, dan jika jumlah yang diminta melebihi produksi daerah maka kekurangannya dipenuhi dari luar daerah.
2. Penduduk setiap daerah memiliki pola permintaan yang sama dengan pola permintaan daerah himpunan (*Azis, 1994:15*).

Kelemahan dari analisis LQ adalah bahwa kriteria ini hanya bersifat statis yang hanya memberi gambaran pada satu titik waktu. Maksudnya bahwa sektor yang menjadi prioritas pada tahun ini belum tentu unggul pada masa yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum unggul pada saat ini akan bisa menjadi prioritas di masa yang akan datang.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{VR_i / VR}{V_i / V} \quad (Azis, 1994 : 154)$$

Keterangan :

VR_i = Kontribusi tenaga kerja / jenis unit usaha tertentu di Kec. Tulungagung

VR = Jumlah tenaga kerja / jenis unit usaha di Kec. Tulungagung

V_i = Kontribusi tenaga kerja / jenis unit usaha tertentu di Kab. Tulungagung

V = Jumlah tenaga kerja / jenis unit usaha di Kab. Tulungagung

Teknik analisis Location Quotient (LQ) merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Cara ini tidak atau belum memberikan kesimpulan akhir. Kesimpulan yang diperoleh baru merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dikaji dan ditilik kembali melalui teknik analisis yang lain yang dapat menguatkan kesimpulan sementara tersebut (Soewarjoko Warpani, 1984:54).

2.2.7. Konsep Teori Indeks Aksesibilitas

Model ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa aksesibilitas angkatan yang bekerja merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan populasi lokasi. Model ini sesungguhnya bukan merupakan model gravitasi murni, karena tidak didasarkan pada interaksi (daya tarik menarik) diantara daerah. Untuk itu lebih tepat dinamakan model potensial, karena mempertimbangkan interaksi potensial atau aksesibilitas relatif dari wilayah. Hansen menyatakan bahwa

aksesibilitas angkutan yang bekerja, indeks aksesibilitas ini dihitung sebagai berikut (Gaspers, 1990 : 121) :

$$A_{ij} = \frac{E_j}{(d_{ij})^b}$$

Dimana :

A_{ij} = Indeks aksesibilitas dari daerah I dalam dalam hubungannya dengan daerah j.

E_j = Total angkutan kerja yang bekerja dalam daerah j (orang)

d_{ij} = Jarak antara daerah i dengan j (Km)

b = Eksponen jarak yang besarnya 2

Indeks aksesibilitas dinyatakan besar apabila nilainya lebih dari satu, maka semakin besar nilai indeks aksesibilitas berarti semakin besar pula fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pertumbuhan daerah sekitarnya sehingga semakin besar pula pengaruh pusat pertumbuhan bagi pengembangan daerah belakang.

Hansen juga menyatakan bahwa dalam aksesibilitas, satu faktor penting yang menentukan berapa banyak populasi akan tertarik ke daerah (area) tertentu adalah jumlah lahan kosong yang dapat digunakan untuk pemukiman bagi penduduk yang tertarik ke suatu lokasi tertentu, beliau menamakannya sebagai kapasitas tanah milik (holding capacity) dari suatu wilayah. (Gaspers 1990 : 122)

III. METODE PENELITIAN



3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian diskriptif komparatif yaitu penelitian yang bermaksud membuat diskripsi kejadian-kejadian atau situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat daerah tertentu. Proses analisa yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kota. Sehingga dapat diketahui bahwa daerah Kota Tulungagung dapat ditingkatkan fungsi dan perannya sebagai cikal bakal sentra industri yang ada diseluruh wilayahnya.

Penelitian dilakukan di Kota Tulungagung, dengan alasan Kota Tulungagung merupakan suatu daerah yang masih memungkinkan untuk terus berkembang dan berbenah. Studi ini dilakukan dengan melalui dua tahapan yaitu tahap kompilasi data dan analisis. Kompilasi data dilakukan dengan melakukan :

1. survey lapangan, untuk mengetahui secara lebih seksama situasi lokasi / daerah studi, terutama daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi kutub pengembangan wilayah.
2. kajian studi pustaka untuk menelaah pengembangan sentra industri kecil di wilayah yang diteliti. Kompilasi data juga diarahkan untuk mengetahui jenis dan aliran barang hasil industri kerajinan yang terdapat di daerah yang diteliti.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara survey lapangan, dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder baik dari Pemda Kabupaten Tulungagung maupun pihak Kecamatan Tulungagung. Ditambah dengan wawancara ke beberapa pengrajin atau pelaku industri yang ada untuk mengetahui arah pemasaran dan

3.3 Metode Analisis Data

Proses analisa yang dipakai dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kota. Analisa ini berfungsi untuk menentukan :

21

1. Tingkat kelayakan suatu daerah sebagai suatu sentra pengembangan industri rakyat. Dalam hal ini ditentukan pusat-pusat pengembangan dalam sektor industri yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam menentukan penilaian terhadap pusat pengembangan ini dilakukan evaluasi terhadap :

a. aksesibilitas, melalui perhitungan

$$A_{ij} = \frac{E_j}{(d_{ij})^b}$$

Dimana :

A_{ij} = Indeks aksesibilitas dari daerah I dalam dalam hubungannya dengan daerah j.

E_j = Total angkatan kerja yang bekerja dalam daerah j (orang)

d_{ij} = Jarak antara daerah i dengan j (Km)

b = Eksponen jarak yang besarnya 2

b. jumlah penduduk (tenaga kerja sektor industri, melalui tingkat prosentase jumlah tenaga kerja disektor industri yang tersebar disuatu daerah).

c. pertumbuhan relatif kota. Melalui pendekatan $P = (P_i - P_o) / P_o \times 100$. Hasil yang didapat bisa dipetakan dan dapat dipakai sebagai alat cross check terhadap kebijakan yang tertuang dalam RUTRK.

Dimana :

P = Pertumbuhan relatif kota

P_i = Jumlah penduduk kota pada tahun akhir analisa

P_o = Jumlah penduduk kota pada awal analisis.

2. Tingkat perkembangan industri daerah melalui pendekatan LQ (location quotient), analisa ini dilakukan dalam dua cara :

a. dilihat dari jumlah tenaga kerja

b. dilihat dari jumlah dan penyebaran unit industri yang ada.

Dari dua analisis diatas juga akan diketahui jenis-jenis industri yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan industri padat modal. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{VR_i / VR}{V_i / V} \quad (\text{Azis, 1994 : 154})$$

Keterangan :

VR_i = Kontribusi tenaga kerja / jenis unit usaha tertentu di Kec. Tulungagung

VR = Jumlah tenaga kerja / jenis unit usaha di Kec. Tulungagung

V_i = Kontribusi tenaga kerja / jenis unit usaha tertentu di Kab. Tulungagung

V = Jumlah tenaga kerja / jenis unit usaha di Kab. Tulungagung

Bila ,

$LQ > 1$, Menyatakan bahwa sektor / sub sektor tersebut merupakan sektor basis.

$LQ < 1$, Menyatakan bahwa sektor / sub sektor tersebut bukan merupakan sektor basis

$LQ = 1$, Menyatakan bahwa sektor / sub sektor tersebut mencukupi kebutuhan daerah.

3.4 Definisi Operasional

1. kelompok industri di sini adalah kelompok industri kecil / kerajinan rumah tangga yang didasarkan pada jenis unit usahanya.
2. perhitungan Location Quotient terhadap potensi tenaga kerja dapat digambarkan melalui suatu pendekatan bahwasannya proporsi dari suatu jumlah industri tertentu terhadap jumlah tenaga kerja industri secara keseluruhan.
3. perhitungan Location Quotient terhadap potensi masing-masing jenis industri dapat digambarkan melalui suatu pendekatan bahwasannya proporsi dari

suatu jumlah industri tertentu terhadap jumlah tenaga kerja industri secara keseluruhan.

4. Kota Tulungagung yang dimaksud adalah meliputi daerah Sub SWP Tulungagung antara lain meliputi Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Ngantru.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Keadaan Geografis

Kota Tulungagung sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tulungagung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Kota Tulungagung memiliki luas 3.959,566 Ha, terdiri dari 29 desa/kelurahan dalam 3 wilayah kecamatan. Pembagian wilayah administrasi Kota Tulungagung dapat dilihat pada Tabel 1.

Batas-batas administrasi Kota Tulungagung adalah disebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Boyolangu (Kecamatan Boyolangu), sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangoan dan Desa Loderasan (Kecamatan Kedungwaru) dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Batangsaren dan Desa Balerejo; Desa Majan dan desa Simo (Kecamatan Kedungwaru).

Secara topografi, Kota Tulungagung terletak pada ketinggian 80-93 meter diatas permukaan laut. Tingkat kemiringan lahan di Kota Tulungagung rata-rata 0 – 2 %. Daerah ini merupakan dataran yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa kota Tulungagung berada pada suatu cekungan / wadah yang menampung curahan hujan yang mengalir dari daerah sekitarnya.

Secara geologi dan morfologi, Kota Tulungagung berada pada daerah cekungan DAS Brantas, mempunyai jenis tanah alluvial hidromorf. Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri fisik warna kelabu, berstuktur liat dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Ditinjau dari tingkat erosi air, memiliki tingkat kecenderungan pengikisan rendah. Jenis tanah alluvial ini potensial bagi pengembangan kegiatan pertanian, baik untuk tanaman padi sawah, polowijo dan

perikanan darat. Disamping itu juga potensial bagi pengembangan perkotaan karena umumnya daerah alluvial ini relatif datar.

Dalam wilayah Kota Tulungagung terdapat sungai Ngrowo yang terletak pada bagian barat kota, selain itu masih terdapat beberapa sungai-sungai kecil yakni saluran drainase Lodagung, sungai Tawang Sari, sungai Mosokerep, sungai

Jenes, sungai Kalisong dan sungai Gangsir. Keadaan air pada musim kemarau rata-rata mempunyai debit yang sedikit menurun jika dibandingkan dengan musim penghujan, sedangkan kedalaman sungai pada musim penghujan berkisar antara 2 sampai 8 meter.

Sebagaimana daerah lain di Indonesia maka iklim tropis masih cukup dominan mempengaruhi keadaan cuaca di Kota Tulungagung, hal ini dapat terjadi karena sesuai dengan letak lintang dari wilayah kota. Banyaknya hujan yang jatuh dalam setahun kurang dari 2.000 mm / tahun atau rata-rata sebesar 1.682 mm / tahun dengan bulan kering selama 6 (enam) bulan. Angin berhembus dengan kecepatan rata-rata antara 15 sampai 20 knots ke arah barat laut, yang pada musim kemarau kecepatan maksimal 17 knots dan pada musim hujan mencapai 20 knots sedangkan temperatur rata-rata untuk wilayah kota berkisar antara 28° sampai 31° celcius.

Tabel 1. Wilayah Administrasi Kota Tulungagung Tahun 2002

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Tulungagung	Kampungdalem Kauman Kutoanyar Kenayan Kepatihan Karangwaru Tamanan Tertek Bago Botoran Jepun Sembung Panggungrejo	
2.	Kedungwaru		Kedungwaru Ketanon Plandaan Mangunsari Tawang Sari Tunggulsari Plosokandang Ringinpitu Rejoagung Tapan Ngujang Gendingan
3.	Boyolangu		Beji Sobontoro Serut Tanjungsari
4.	Ngantru		Banjarsari Bendosan Kepuhrejo Mejoagung

Sumber : Bappeda Kabupaten Tulungagung, Tahun 2002

26

4.1.2 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Tulungagung menurut data Kantor Statistik Kota Tulungagung pada tahun 2002 sebesar 262.618 jiwa. Kota Tulungagung ditinjau dari jumlah penduduknya selalu mengalami peningkatan. Jumlah penduduk di Kota Tulungagung pada tahun 1998 sebesar 253.023 jiwa dan pada tahun 2002 sebesar 262.618. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Tulungagung selama tahun 1998 – 2002 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 1998 – 2002

NO	Tahun	Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan penduduk (%)
1	1998	253.023	0,70
2	1999	255.074	0,81
3	2000	258.523	1,35
4	2001	261.498	1,15
5	2002	262.618	0,43

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung 2002

Tabel 2 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan relatif penduduk mulai tahun 1998 sampai tahun 2002 cenderung naik turun dari tahun ketahun dan pertumbuhan pertahun relatif kecil yaitu sebesar 0,88% per tahun. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang kecil ini diakibatkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana di Kabupaten Tulungagung.

Disamping itu distribusi penduduk yang kurang merata disetiap tempat, akan tetapi pada wilayah yang sudah berkembang terutama di pusat sub wilayah

pengembangan mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai daya tarik dan kemampuan tingkat pelayanan yang lebih baik dan lebih lengkap.

b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian penduduk Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2002 yang menonjol adalah dibidang pertanian 369.634 jiwa. Sedangkan mata pencaharaan yang lain yaitu industri sebanyak 19.146 jiwa, bangunan sebanyak 13.953 jiwa, perbankan dan perdagangan sebanyak 21.157 jiwa, perikanan 7.167 jiwa, pegawai negeri sipil 15.665 jiwa, TNI / ABRI 1.810 jiwa, swasta tidak termasuk pegawai bank swasta 40.903 jiwa, pelayanan 5.913 jiwa dan lain-lain 33.028 jiwa

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang diikutsertakan dalam proses ekonomi. Di Kabupaten Tulungagung usia kerja (tenaga kerja) dengan usia antara 15 - 64 tahun pada tahun 2001 sejumlah 660.524 jiwa, tahun 2002 sejumlah 667.251 jiwa.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari daya serap pasaran tenaga kerja, serta masih banyaknya tenaga kerja yang kurang siap pakai (*unskilled*). Salah satu upaya pemecahan masalah ketenagakerjaan antara lain ditempuh dengan kebijaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Program lainnya adalah dengan cara program transmigrasi.

4.1.3 Jenis Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga

Di kabupaten Tulungagung terdapat 9 jenis industri kecil / kerajinan rumah tangga yaitu :

1. makanan, minuman dan tembakau
2. tekstil, barang kulit dan alas kaki
3. barang kayu dan hasil hutan lainnya
4. kertas dan barang cetakan

5. pupuk, kimia dan barang dari karet
6. semen dan barang galian non logam
7. logam dasar, besi dan baja
8. alat angkutan, mesin dan peralatan
9. barang lainnya

Dimana pada tahun 2001 jumlah total dari unit usaha sebanyak 5.767 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan sebesar 32.614 jiwa. Dimana dari segi jumlah unit usaha mengalami penurunan sebesar 1.234 unit usaha dibandingkan tahun 2000 yang sebesar 7.001 unit usaha, sedangkan untuk jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 883 orang dibandingkan tahun 2000 yang sebesar 31.731 orang. Secara umum, tiap tahun jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini diakibatkan karena adanya krisis ekonomi, selain itu juga adanya peningkatan efektifitas dan adanya efisiensi. Untuk lebih jelas lihat tabel 3 .

Didalam pendistribusian barang dagangan langsung dikirim ke berbagai daerah. Produk-produk unggulan di kabupaten Tulungagung adalah marmer, barang tekstil, barang-barang dari besi atau logam, rokok, kertas. Sebagian besar pemasaran produk yang dihasilkan industri kecil adalah lokal dan regional, sedangkan produk yang menembus pasar ekspor adalah sumpit bambu yang diekspor ke Taiwan, marmer yang diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Taiwan, serta kertas yang diekspor ke Bangladesh, Singapura, Taiwan, Srilanka, Norwegia dan Hongkong.

Sedangkan untuk bahan baku yang dipergunakan untuk berbagai jenis industri juga bervariasi, industri-industri yang besar pada umumnya mengambil bahan baku dari luar kota. Misal industri tenun mendatangkan bahan baku dari Mojokerto dan Bandung (serat tenun, nylon, katun dan bahan-bahan lainnya). Untuk industri bahan baku bangunan yang kualitasnya cukup bagus, misal genteng Karangpilang , bahan bakunya didatangkan dari luar kota, sedangkan untuk bahan bangunan yang berkualitas rendah, bahan dasarnya tersedia didalam wilayah kota sendiri. Beberapa industri lain yang mengambil bahan baku lokal adalah industri makanan, industri barang kayu dan hasil hutan, dan sebagainya.

Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Jenisnya
2001

2	3		4		5		6		7		8		9		Jumlah	
	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK	Unit	TK
-	-	-	1	3	-	-	57	505	-	-	3	10	-	-	184	767
1	17	257	4	8	-	-	14	89	-	-	8	39	-	-	358	1069
2	12	216	2	4	-	-	4	27	-	-	4	12	-	-	228	485
3	11	63	7	16	-	-	137	716	-	-	5	13	-	-	216	1013
-	-	2	1	2	-	-	19	56	-	-	-	-	-	-	22	74
-	-	1	-	-	-	-	155	260	-	-	4	13	-	-	160	285
4	15	91	3	6	-	-	113	182	-	-	4	13	-	-	236	368
2	8	38	3	6	1	18	76	213	-	-	3	17	1	9	198	513
15	1799	300	6	184	-	-	315	1105	-	-	110	1311	1	18	780	5076
10	25	531	2	6	1	5	25	75	-	-	5	35	-	-	576	1107
193	1057	4	9	59	3	28	126	448	-	-	41	54	-	-	417	2178
9	29	159	2	4	-	-	556	1674	-	-	260	910	1	12	1183	6857
45	298	3	2	4	-	-	7	35	-	-	4	76	1	30	68	517
105	3322	4	12	44	1	8	2	31	-	-	53	189	3	57	204	6945
247	1027	50	7	474	4	36	10	101	-	-	48	127	-	-	478	3656
2	24	7	3	4	1	8	15	45	-	-	4	22	1	3	175	799
10	25	5	3	6	-	-	45	150	-	-	19	145	-	-	86	407
-	-	116	1	2	-	-	15	40	-	-	-	-	1	3	133	397
-	-	61	1	3	-	-	3	9	-	-	-	-	-	-	65	103
648	7669	1908	69	835	11	103	1694	5761	-	-	575	2986	9	132	5767	32614
661	7634	3250	18	806	11	103	1668	5683	-	-	536	2931	9	132	7001	31731
625	7103	3248	18	776	11	103	1678	5591	-	-	530	2887	8	125	6958	33263
616	6930	3088	64	447	13	87	1668	5553	-	-	535	2910	-	-	7013	27974

Kab. Tulungagung

Tabel 3

No	Kecamatan	Unit	TK
1	Besuki	123	249
2	Banding	74	156
3	Pakej	-	-
4	Campurdarat	1	18
5	Tg. Gunung	-	-
6	Pucanglaban	-	-
7	Kalidawir	21	26
8	Rejotangan	74	164
9	Ngunut	33	346
10	Sumbergempol	2	42
11	Boyolangu	41	473
12	Gondang	196	604
13	Kaunian	6	47
14	T. Agung	24	3263
15	Kedungwaru	112	1550
16	Ngantru	142	614
17	Karangrejo	4	50
18	Sendang	-	-
19	Pagerwojo	-	-
Jumlah : 2001		853	7502
2000		846	7554
1999		840	9231
1998		1009	4929

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Keterangan

1. Makanan, Minuman dan Tembakak
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya
4. Kertas dan Barang Cetak
5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet
6. Semen dan barang Galian Non Logam
7. Logam Dasar, Besi dan Baja
8. Alat Angkutan, Mesin dan Perakitan
9. Barang Lainnya

4.1.4 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tulungagung

Kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Tulungagung dilaksanakan melalui kebijaksanaan pembangunan wilayah dan tata ruang pembangunan.

a. Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Pembangunan

Mengingat bahwa pembangunan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan bagian pembangunan daerah Propinsi Jawa Timur, yang sekaligus bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu dipelihara keserasian dan keselamatan antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional, untuk itu pada setiap kegiatan pembangunan daerah selain memperhatikan kondisi potensi dari prioritas daerah di Kabupaten Tulungagung diusahakan terpeliharanya laju pembangunan antar wilayah, sehingga dapat memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Untuk bagian wilayah yang masih terbelakang dan kurang berkembang perlu diberikan prioritas pengembangan dan motivasi pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya. Untuk menunjang kebijaksanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Tulungagung maka dibagi menjadi 6 (enam) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP), yaitu :

- a. Sub SWP Tulungagung dan sekitarnya dengan pusat di Tulungagung meliputi kecamatan-kecamatan : Tulungagung, Kedungwaru, Boyolangu dan Ngantru. Kegiatan utama meliputi : pendidikan, perdagangan, jasa, pemukiman, perikanan, industri kecil, peternakan dan pertanian
- b. Sub SWP Ngunut dan sekitarnya dengan pusat di Ngunut meliputi kecamatan-kecamatan : Ngunut, Rejotangan dan Sumbergempol. Kegiatan utama meliputi : pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri kecil, perdagangan, pertambangan dan pendidikan.
- c. Sub SWP Kalidawir dan sekitarnya dengan pusat di Kalidawir, meliputi

kecamatan-kecamatan : Kalidawir, Tanggunggunung, dan Pucanglaban.

Kegiatan utama meliputi : pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata

- d. Sub SWP Campurdarat dan sekitarnya dengan pusat di Campurdarat, meliputi kecamatan-kecamatan : Campurdarat, Besuki, Pakel, dan Bandung. Kegiatan

31

utama meliputi : pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri kerajinan, pertambangan dan pariwisata

- e. Sub SWP Kauman dan sekitarnya dengan pusat di Kauman, meliputi kecamatan-kecamatan : Kauman, Gondang dan Karangrejo. Kegiatan utama meliputi : pertanian, industri kerajinan, kehutanan, perikanan, perkebunan dan peternakan
- f. Sub SWP Sendang – Pagerwojo dengan pusat di Sendang, meliputi kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Kegiatan utama meliputi : pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan peternakan

b. Kebijakan Pembangunan Industri Kecil dan Tujuan Pembangunan

Pengembangan potensi industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan serta industri rumah tangga di Kabupaten Tulungagung, dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan kegiatan usaha ekonomi skala kecil dan menengah yang produktif, dan mendukung perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Pengembangan potensi ini ditempuh dengan cara :

- a. meningkatkan wawasan kewirausahaan jasa pengusaha maupun calon pengusaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga
- b. meningkatkan ketrampilan dalam aspek produksi, manajemen dan pemasaran
- c. mengembangkan pengendalian mutu dengan menumbuhkan dan meningkatkan mutu
- d. meningkatkan usaha kemitraan dengan usaha besar dan sektor ekonomi lainnya

Peningkatan kemampuan teknologi industri merupakan upaya yang

strategis akan dilaksanakan secara berkesinambungan agar kemampuan industri dapat terus berkembang sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk industri .

Pembangunan sektor industri yang telah dilaksanakan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan struktur ekonomi daerah. Melalui

pembangunan sektor industri memberikan dampak terhadap perluasan kerja dan berusaha, peningkatan nilai produksi, peningkatan daya saing industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan penguasaan teknologi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan industri di Kabupaten Tulungagung adalah :

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merta dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budidaya dan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha
- d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri
- e. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan industri dalam pembangunan

(*Bappeda Tulungagung tahun anggaran 2002*)

Menghadapi persaingan yang semakin tajam pada era otonomi ini, industri daerah harus berakar pada potensi kemampuan daerah. Dalam kaitan ini maka kuantitas sumber daya manusia yang besar dan peningkatan kualitas merupakan kekuatan daerah dan sekaligus merupakan kekuatan nasional

4.2.1. Analisis Penentuan Penilaian Terhadap Pusat Pengembangan

Dalam menentukan penilaian terhadap pusat pengembangan ini dilakukan dengan beberapa evaluasi, yaitu :

a. Aksesibilitas

33

b. Jumlah penduduk

Yaitu meliputi tenaga kerja industri, melalui tingkat prosentase jumlah tenaga kerja industri kecil yang tersebar disuatu daerah

c. Pertumbuhan relatif

Dimana hasil yang didapat bisa dipetakan dan dapat dipakai sebagai alat cross check terhadap kebijakan yang tertuang dalam RTURK

Berangkat dari kerangka pemikiran Glasson (1991 : 147) bahwa dewasa ini belum ada alat analisis dalam telaah ekonomi regional yang memiliki validitas tinggi dalam menggambarkan peranan pusat pertumbuhan terhadap pengembangan daerah belakangnya, maka penelitian ini diarahkan pada perilaku kawasan tersebut yang digambarkan melalui interaksi antar kawasan itu sendiri. Interaksi yang dimaksud misalnya interaksi penduduk antar kawasan, interaksi berupa aliran sumberdaya baik modal, manusia, keuangan dan lain-lain.

a. Analisa Indeks Aksesibilitas

Daya tarik yang besar dari pusat pertumbuhan terhadap daerah belakangnya dapat disebabkan juga oleh tingginya angka indeks aksesibilitas. Indeks aksesibilitas menggambarkan berapa besar aksesibilitas angkatan kerja yang bekerja (penduduk produktif) di suatu wilayah dalam hal ini kecamatan pusat pertumbuhan. Keberadaan angkatan kerja yang bekerja merupakan salah satu daya tarik wilayah sehingga mampu memberikan peranan terhadap wilayah yang lain. Hasil perhitungan indeks aksesibilitas masing-masing kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2001. Kecamatan Sub SWP Tulungagung dengan pusat Kecamatan Tulungagung yang meliputi Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Ngantru mempunyai nilai indeks aksesibilitas tertinggi sebesar 4.397 dengan jumlah angkatan kerja sebesar 39.571

orang. Sedangkan untuk nilai indeks aksesibilitas terendah terdapat pada Kecamatan Sub-SWP Sendang – Pagerwojo yang meliputi Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo mempunyai nilai indeks aksesibilitas sebesar 64,30 dengan jumlah angkatan kerja 25.718 orang.

Dari hasil perhitungan analisis indeks aksesibilitas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan angka indeks aksesibilitas di setiap kecamatan di kabupaten Tulungagung tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 912,54. Dapat dikatakan bahwa pusat pertumbuhan di Kabupaten Tulungagung mampu memberikan peranan terhadap daerah belakangnya dilihat dari akses jumlah angkatan kerja. Hasil perhitungan indeks Aksesibilitas dapat dilihat pada lampiran 1.

b. Prosentase Jumlah tenaga kerja industri yang tersebar di Kab. Tulungagung

Dari tinjauan terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Tulungagung mampu menyerap jumlah tenaga kerja industri kecil yang cukup besar. Tenaga kerja tersebut selain berasal dari Kecamatan Tulungagung juga diambil dari kecamatan-kecamatan sekitarnya dan Kecamatan Tulungagung sendiri. Karena jenis kegiatannya tidak memerlukan ketrampilan tinggi, maka tenaga yang dibutuhkan umumnya berasal dari tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, atau tidak memerlukan pendidikan formal khusus.

Dari 19 Kecamatan yang ada, Kecamatan Tulungagung memegang primasi yang paling besar yakni mencapai 21,29 % dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tulungagung. Peringkat berikutnya adalah Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu yang masing-masing mencapai 21,02 % ; 15,56 % ; 11,21 % ; 6,68 %. Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan lainnya hampir merata antara 0 – 3 %. Untuk proporsi penyerapan tenaga kerja ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	TK	%
1	Besuki	767	2.35
2	Bandung	1.069	3.28
3	Pakel	485	1.49
4	Campurdarat	1.013	3.11
5	Tg. Gunung	74	0.23
6	Pucanglaban	285	0.87
7	Kalidawir	366	1.12
8	Rejotangan	513	1.57
9	Ngunut	5.076	15.56
10	Sumbergempol	1.107	3.39
11	Boyolangu	2.178	6.68
12	Gondang	6.857	21.02
13	Kauman	517	1.59
14	T.Agung	6.945	21.29
15	Kedungwaru	3.656	11.21
16	Ngantru	799	2.45
17	Karangrejo	407	1.25
18	Sendang	397	1.22
19	Pagerwojo	103	0.32
	Jumlah	32.614	100

Dari hasil perhitungan prosentase tenaga kerja industri dapat diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang menonjol dalam kemampuannya menyerap tenaga kerja yaitu (secara peringkat) : Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu. Kalau dilihat dari Sub SWP, maka Sub SWP Tulungagung yang terdiri dari Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Boyolangu dan Ngantru yang mempunyai penyerapan tenaga kerja yang paling banyak.

c. Analisa Pertumbuhan Relatif Kota

Tinjauan analisa pertumbuhan relatif kota dapat digunakan sebagai alat cross check terhadap kebijakan perkotaan yang tertuang dalam RUTRK Kabupaten Tulungagung. Penduduk merupakan unsur yang penting dalam

36

kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun perekonomian. Penduduk memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi, karena penyediaan tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan, dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Penduduk selain sebagai pengembang teknologi dan yang mengorganisasi penggunaan berbagai fasilitas produksi, jumlah penduduk mencerminkan adanya potensi untuk mengolah sumber daya alam dan juga mencerminkan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu perlu adanya analisis terhadap pertumbuhan relatif suatu kota, sehingga dapat digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam pembangunan khususnya pembangunan industri.

Dari analisa yang telah dilakukan terhadap 19 kecamatan antara tahun 1997 - 2001, menunjukkan bahwa yang memiliki pertumbuhan relatif kota tertinggi dipegang oleh Kecamatan Kedungwaru yaitu sebesar 6,15 %, dan diikuti oleh Kecamatan Boyolangu, Rejotangan, Pucanglaban yaitu sebesar 5,20 % ; 5,00 % ; 4,55 %. Sedangkan untuk kecamatan lain berkisar antara 0 – 4 %. Dari data tersebut juga diketahui bahwa Sub SWP Tulungagung menunjukkan bahwa dalam pertumbuhan relatif kota memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, dibuktikan dengan adanya 2 (dua) bagian Sub SWP Tulungagung yang termasuk dalam pertumbuhan relatif kota tertinggi yaitu kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu. (Lihat Lampiran 4)

4.2.2 Analisa Tingkat Perkembangan Industri kecil di Kabupaten Tulungagung melalui pendekatan LQ (Loacation Quationt)

a. Analisa Location Quationt Terhadap Jumlah dan Jenis Unit Usaha

seberapa besar potensi masing-masing jenis industri di setiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Dimana dari analisa yang dilakukan menunjukkan suatau hasil yang ekstrim, dimana kemampuan ekspor untuk beberapa jenis industri terdapat didalam Sub SWP Tulungagung, yaitu industri makanan,

minuman dan tembakau terdapat di Kecamatan Ngantru yaitu dengan nilai 5,486 ; industri kertas dan barang cetakan terdapat di Kecamatan Tulungagung yaitu dengan nilai 4,916 ; industri pupuk, kimia dan barang dari karet , dimana yang mempunyai nilai LQ tertinggi yaitu Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu, yaitu dengan nilai masing-masing 4,388 dan 3,773 ; industri alat angkutan, mesin dan peralatan terdapat di Kecamatan Tulungagung dengan nilai 2,606 ; dan industri barang lainnya, Kecamatan Tulungagung juga mendapat nilai tertinggi yaitu 9, 421 nilai ini sama dengan yang dimiliki Kecamatan Kauman.

Untuk industri lainnya terdapat pada di kecamatan lain, yaitu industri tekstil, barang kulit dan alas kaki nilai tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Kauman dengan nilai 5,890 walaupun demikian untuk urutan berikutnya dipegang oleh kecamatan-kecamatan yang ada dalam Sub SWP Tulungagung, yaitu kecamatan Kedungwaru, Tulungagung dan Boyolangu (dengan nilai masing-masing 4,599; 4,581; 4,119) ; industri barang kayu dan hasil hutan lainnya nilai tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Pakel dan Pagerwojo dengan nilai masing-masing 2,863 dan 2,837. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 5.

Namun dari hasil yang ditunjukkan tersebut tidaklah menunjukkan potensi ekspor yang sebenarnya karena analisis yang dilakukan hanya didasarkan pada jumlah unit usahanya.

Tabel 5. Perhitungan LQ 2001 terhadap Jumlah dan Jenis Unit Usaha

NO	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Besuki	4.519	0.000	0.000	0.454	0.000	1.055	0.000	0.164	0.000
2	Bandung	1.397	0.025	2.170	0.934	0.000	0.133	0.000	0.224	0.000
3	Pakel	0.000	0.078	2.863	0.733	0.000	0.060	0.000	0.176	0.000
4	Campurdarat	0.031	0.124	0.882	2.709	0.000	2.159	0.000	0.232	0.000
5	Tg. Gunung	0.000	0.000	0.275	3.799	0.000	2.940	0.000	0.000	0.000
6	Pucanglaban	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	3.298	0.000	0.251	0.000
7	Kalidawir	0.602	0.151	1.165	1.062	0.000	1.630	0.000	0.170	0.000
8	Rejotangan	2.527	0.090	0.580	1.266	2.648	1.307	0.000	0.152	3.235
9	Ngunut	0.286	0.171	1.163	0.643	0.000	1.375	0.000	1.414	0.821
10	Sbr.gempol	0.023	0.155	2.786	0.290	0.910	0.148	0.000	0.087	0.000
11	Boyolangu	0.665	4.119	0.029	1.804	3.773	1.029	0.000	0.986	0.000
12	Gondang	1.120	0.068	0.406	0.141	0.000	1.600	0.000	2.204	0.542
13	Kauman	0.597	5.890	0.133	2.458	0.000	0.350	0.000	0.590	9.421
14	T.Agung	0.795	4.581	0.059	4.916	2.571	0.033	0.000	2.606	9.421
15	Kedungwaru	1.584	4.599	0.316	1.224	4.388	0.071	0.000	1.007	0.000
16	Ngantru	5.486	0.102	0.121	1.433	2.996	0.292	0.000	0.229	3.661
17	Karangrejo	0.314	1.035	0.176	2.915	0.000	1.781	0.000	2.216	0.000
18	Sendang	0.000	0.000	2.636	0.628	0.000	0.384	0.000	0.000	4.817
19	Pagerwojo	0.000	0.000	2.837	1.286	0.000	0.157	0.000	0.000	0.000

Keterangan :

1. Makanan, minuman dan tembakau
2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki
3. Barang kayu dan hasil hutan lainnya

4. Kertas dan barang cetakan
5. Pupuk, kimia dan barang dari karet
6. Semen dan barang galian non logam
7. Logam dasar, besi dan baja
8. Alat angkutan, mesin dan peralatan

b. Analisa Location Quotient terhadap Tenaga Kerja Industri

Perhitungan Location Quotient (LQ) terhadap potensi tenaga kerja untuk sektor tertentu di kecamatan tertentu dapat digambarkan melalui suatu pendekatan bahwasannya proporsi dari suatu jumlah tenaga kerja industri tertentu terhadap jumlah tenaga kerja industri secara keseluruhan dianggap sebagai kemampuan relatif dari kecamatan tersebut untuk berkembang.

Dari perhitungan Location Quotient terhadap jumlah potensi ekspor tenaga kerja industri makanan, minuman dan tembakau di Kecamatan Ngantru dengan nilai 3,297. Sedangkan untuk industri lainnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Perhitungan LQ 2001 terhadap Tenaga Kerja Industri

NO	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Besuki	1.393	0.000	0.000	0.153	0.000	3.727	0.000	0.142	0.000
2	Bandung	0.626	0.068	3.081	0.292	0.000	0.471	0.000	0.398	0.000
3	Pakel	0.000	0.105	3.842	0.322	0.000	0.315	0.000	0.270	0.000
4	Campurdarat	0.076	0.046	1.022	0.617	0.000	4.001	0.000	0.140	0.000
5	Tg. Gunung	0.000	0.000	0.937	1.056	0.000	4.284	0.000	0.000	0.000
6	Pucanglaban	0.000	0.000	0.182	0.000	0.000	5.165	0.000	0.498	0.000
7	Kalidawir	0.305	0.174	1.468	0.640	0.000	2.815	0.000	0.388	0.000
8	Rejotangan	1.372	0.066	0.659	0.457	11.111	2.351	0.000	0.362	4.335
9	Ngunut	0.292	1.507	0.267	1.416	0.000	1.232	0.000	2.821	0.876
10	Sumbergempol	0.163	0.096	3.598	0.212	1.430	0.384	0.000	0.345	0.000
11	Boyolangu	0.932	2.064	0.117	1.058	4.071	1.164	0.000	0.271	0.000
12	Gondang	0.378	0.018	2.290	0.023	0.000	1.382	0.000	1.450	0.432
13	Kauman	0.390	2.451	0.226	0.302	0.000	0.383	0.000	1.606	14.338
14	T.Agung	2.016	2.034	0.019	0.247	0.365	0.025	0.000	0.297	2.028
15	Kedungwaru	1.819	1.195	0.404	5.064	3.118	0.156	0.000	0.379	0.000
16	Ngantru	3.297	0.128	0.428	0.196	3.171	0.319	0.000	0.301	0.928
17	Karangrejo	0.527	0.261	0.330	0.576	0.000	2.086	0.000	3.891	0.000

18	Sendang	0.000	0.000	3.842	0.197	0.000	0.570	0.000	0.000	1.867
19	Pagerwojo	0.000	0.000	3.829	1.138	0.000	0.495	0.000	0.000	0.000

Dari data diatas menunjukkan untuk potensi ekspor tenaga kerja industri cenderung merata, akan tetapi Sub SWP Tulungagung masih juga mendominasi

Dari data diatas menunjukkan untuk potensi ekspor tenaga kerja industri cenderung merata, akan tetapi Sub SWP Tulungagung masih juga mendominasi untuk pasar tenaga kerja walaupun hanya menempati pada posisi dua ataupun tiga dalam peringkat nilainya.

4.3 Pembahasan

Proses perkembangan daerah terjadi akibat interaksi ruang berdasarkan prinsip aglomerasi atau skala ekonomi menuju efisiensi. Ekonomi pusat pertumbuhan akan menjadi pusat kegiatannya sendiri dan pusat kegiatan dari daerah sekitarnya. Berarti daerah sekitarnya yang lebih kecil sangat tergantung pada tersedianya kegiatan yang ada pada pusat pertumbuhan sesuai dengan teori tempat sentral. Dalam teori pusat pertumbuhan untuk menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya dan mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi daerah belakangnya, maka suatu daerah harus dipandang dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya dengan dasar saling menguntungkan. Daerah harus melaksanakan fungsinya sebagai pusat pelayanan seperti pemerintahan, perdagangan, pengolahan barang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Fungsi tersebut meliputi fungsi intern dan fungsi ekstern. Fungsi intern adalah pelayanan untuk daerah untuk daerah itu sendiri dan fungsi ekstern adalah pelayanan untuk daerah sekitarnya.

Sesuai dengan teori pusat pertumbuhan, Kabupaten Tulungagung dalam kebijaksanaan pembangunan terbagi menjadi enam SSWP. Dasar pembagian SSWP memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang terbagi menjadi pusat pertumbuhan dan daerah belakang. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah daerah yang memiliki potensi lebih dan menyediakan fasilitas yang

diperlukan oleh daerah belakangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Myrdall (dalam Nursyasinan, 1996 : 243) bahwa tempat-tempat yang menarik adalah tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik pemusatan kegiatan perekonomian, sehingga daerah tersebut memiliki keuntungan komparatif dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah yang

Campurdat, Kecamatan Kauman, Kecamatan Sendang-Pagerwojo mempunyai sarana dan prasarana lebih banyak daripada daerah sekitarnya.

Aksesibilitas angkatan kerja yang bekerja menggambarkan tingkat interaksi atau daya tarik suatu wilayah. Semakin banyak angkatan kerja yang bekerja didalam suatu wilayah berarti akan memperlihatkan sumber daya manusia yang potensial yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah penduduk usia produktif yang benar-benar bekerja.

Hasil perhitungan analisis indeks aksesibilitas memperlihatkan bahwa tingkat interaksi tertinggi terdapat pada SSWP Tulungagung dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Tulungagung dengan daerah belakang Kecamatan Kedungwaru. Tingginya tingkat interaksi tersebut dipengaruhi oleh jarak yang dekat dengan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (Tulungagung – Kedungwaru berjarak 3 Km), sebaliknya jarak yang cukup jauh antara kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Boyolangu dan Ngantru memiliki indeks aksesibilitas terendah. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa dalam menganalisis indeks aksesibilitas, variabel jarak sangat mempengaruhi kuat lemahnya interaksi atau besar kecilnya daya tarik antar wilayah.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang terpenting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja. Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun perekonomian.

Dari hasil prosentase tenaga kerja industri yang tersebar di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa Kota Tulungagung merupakan pemegang primasi terbesar dalam jumlah tenaga kerja, dimana tiga kecamatan termasuk dalam lima besar untuk kategori penyerapan tenaga kerjanya. Hal ini

menunjukkan bahwa Kota Tulungagung memiliki daya tarik yang lebih dibandingkan daerah lain.

Penduduk memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi karena penyediaan tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan dan usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan

ekonomi. Penduduk selain sebagai pengembang teknologi dan mengorganisasi penggunaan berbagai fasilitas produksi, jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Jumlah penduduk yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan perkapita.

Dari hasil pertumbuhan relatif dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu memiliki tingkat pertumbuhan relatif yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan relatif penduduk tertinggi juga dipegang oleh Kota Tulungagung, ini dikarenakan Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu merupakan bagian dari Sub SWP Kota Tulungagung.

Salah satu alat untuk analisa untuk menganalisa peranan sektor pembangunan dalam suatu daerah adalah dengan mengamati location quotient (LQ), yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan “kekuatan” atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama didaerah lain.

Analisis Location Quotient dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan sektor atau subsektor dalam kegiatan ekonomi didaerah. Jika suatu sektor atau sub sektor memiliki $LQ > 1$, maka sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor atau subsektor potensial dan akan mengekspor produknya keluar daerah dan sektor atau subsektor tersebut dapat digunakan sebagai leading sektor, karena sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya jika sektor atau subsektor memiliki nilai $LQ < 1$ maka sektor atau subsektor tersebut lemah dengan kata lain daerah tersebut mengimpor produk dari sektor atau subsektor tersebut.

Dari hasil analisa LQ terhadap jumlah dan unit usaha yang dilakukan

terhadap potensi industri kecil yang ada di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) jenis industri yang ada, 5 (lima) jenis potensi industri terdapat di Wilayah Sub SWP Tulungagung (Kota Tulungagung). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekspor terhadap 5 (lima) jenis industri tersebut sangat besar dibandingkan dengan daerah lain. Apabila dikelompokkan dalam

rendah, sedang dan tinggi terhadap kemampuan ekspor dari 5 (lima) jenis industri, maka yang berkemampuan ekspor tinggi adalah : industri barang lain (Kec. Tulungagung); industri makanan, minuman dan tembakau (Kec. Ngantru); industri kertas dan barang cetakan (Kec. Tulungagung); industri pupuk, kimia dan barang dari karet (Kec. Kedungwaru) dan industri alat angkutan, mesin dan peralatan (Kec. Tulungagung). Namun demikian hasil tersebut tidaklah menunjukkan potensi ekspor yang sebenarnya karena analisis hanya didasarkan dari jumlah unit usaha.

Sedangkan untuk perhitungan LQ terhadap tenaga kerja terlihat bahwa potensi ekspor tenaga kerja tidak terfokus dalam satu Sub SWP saja, melainkan banyak tersebar di beberapa kecamatan, namun demikian Sub SWP Tulungagung mempunyai sumbangan ekspor rata-rata tenaga kerja yang cukup lumayan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa data dan pembahasan didapatkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kota Tulungagung ternyata memiliki potensi untuk diangkat sebagai suatu kota sentra industri baru untuk menampung dan mendistribusikan barang produk industrinya. Dimana industri yang perlu dibuatkan suatu sentra industri baru adalah meliputi industri barang lain; industri makanan, minuman dan tembakau; industri kertas dan barang cetakan; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; dan industri alat angkutan, mesin dan peralatan
2. jenis industri yang memungkinkan untuk dibuatkan suatu sentra adalah industri makanan, minuman dan tembakau; industri kertas dan barang cetakan; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; industri alat angkutan, mesin dan peralatan; dan industri barang lain.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang kelayakan lokasi dimana sentra industri tersebut ditempatkan. Tentunya akan banyak faktor pengaruh yang terlibat, misal : jenis polutan industri, kondisi fisik kota serta peraturan daerah yang ada (Rencana Pengembangan Wilayah IKK Kota Tulungagung dalam RUTRK dan RDTRK).

Potensi sentra industri Kota Tulungagung hendaknya didukung oleh perangkat hukum serta kebijakan-kebijakan dalam upaya menstimulasi perkembangan industri lebih cepat, seperti halnya pemberian ijin fasilitas industri, pembinaan lebih intensif terhadap beberapa *home industry* serta pengadaan fasilitas infrastruktur perkotaan.

Seperti kebanyakan kota di Indonesia, Kota Tulungagung merupakan pusat kegiatan warga kotanya yang sangat beragam yang dituntut untuk mampu mewadahi pertemuan antara konsumen dan produsen. Oleh karena itu, Kota Tulungagung harus dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan perannya baik

dalam skala lokal maupun regional. Ada beberapa hal yang selayaknya ditingkatkan keberadaannya untuk Kota Tulungagung, antara lain bahwa :

1. perlu didirikan pusat data produk, kegiatan dan distribusinya dapat menghubungkan konsumen dan produsen, dengan kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan warga kotanya dan akan mempengaruhi perkembangan lain di berbagai sektor, misalnya transportasi, perdagangan, industri kerajinan setempat dan lain sebagainya
2. Kota Tulungagung perlu melihat kembali karakteristik daerah belakangnya, sehingga potensi utama dari kota dan daerah belakangnya dapat terlihat dan digunakan sebagai modal pembangunan
3. putra daerah (hinterland) diharapkan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan wilayahnya

Atas dasar pemikiran diatas, perkembangan kota harus dapat meninjau dan mengantisipasi kebijaksanaan-kebijaksanaan regional yang mengatur perkembangan kota tersebut. Kebijakan ini adalah strategi pembangunan regional yang mencakup kebijaksanaan perwilayahan, sistem kota-kotanya, fungsi dan peran kota serta arah perkembangannya. Disamping itu, juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan rencana daerah sekitar yang mungkin membawa pengaruh terhadap perkembangan Kota Tulungagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Sufianto, Wahid Hasyim, Surjono, **Studi Pengembangan Sentra Industri Rakyat Di Kota Ngunut, Kabupaten Dati II Tulungagung**, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Social Science) Vol.10 No. 1, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang, Februari 1998.
- Budhy Tjahjati S. Soegijoko, **Masalah Penyediaan Tanah Dalam Hubungan dengan Pengembangan Kota**, Jurnal Dwibulan, Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Bandung, April 1988.
- Djoyohadikusumo, Sumitro. 1994. **Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan**. Jakarta : LP3ES.
- Kristiadi, J.B. 1992. **Pembangunan Regional dan Permasalahannya**. Jakarta :Analisa CSIS.
- Budiharsono. 1991. **Perencanaan Pembangunan Wilayah : Teori, Model, Perencanaan dan Penerapannya**. Jakarta : UI
- Raymond E,Murphy and Vance JE. Jr, **Delimitating The CBD Economic Geography**, Juli 1954.
- Glasson, J. 1997. **Pengantar Perencanaan Regional**. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : LPFE-UI
- Aziz, Iwan Jaya. 1994. **Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia**. Jakarta : LPFE-UI
- Arsyad, L . 1998. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Bappeda Kabupaten Tulungagung. 2002. **Data Pokok Faktor & Analisa Kab. Tulungagung Tahun 2002**. Tulungagung : Pemerintah Kabupaten

Bappeda Kabupaten Tulungagung, 1994. **Rencana Umum Tata Ruang Kota
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Tahun 1986-2009.**

Tulungagung : Pemerintah Kabupaten Tulungagung

BPS Kabupaten Tulungagung, 2001. **Tulungagung Dalam Angka.** Jember : BPS

Lampiran 1.

Perhitungan Analisa Indeks Aksesibilitas Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2002

Sub Satuan Wilayah Pembangunan	Ej	(dij)2	Aij
A. TULUNGAGUNG			
Pusat di : Tulungagung	39,571		
Meliputi : Kedungwaru		9	4,397
Boyolangu		49	808
Ngantru		49	808
B. NGUNUT			
Pusat di : Ngunut	42,544		
Meliputi : Rejotangan		36	1181.78
Sumbergempol		81	525.23
C. KALIDAWIR			
Pusat di : Kalidawir	40,278		
Meliputi : Tanggunggunung		289	139.37
Pucanglaban		400	100.70
D. CAMPURDARAT			
Pusat di : Campurdarat	28,990		
Meliputi : Besuki		124	233.79
Pakel		25	1159.60
Bandung		64	452.97
E. KAUMAN			
Pusat di : Kauman	29,410		
Meliputi : Gondang		25	1176.40
Karangrejo		36	816.94
F. SENDANG-PAGERWOJO			
Pusat di : Sendang	25,718		
Meliputi : Pagerwojo		400	64.30

Jarak Terdekat Antar Ibu Kota Kecamatan
2001

	Tigunung	Pucangiaban	Kalidavir	Rejilangan	Ngunt	Sbr.gampil	Boylangu	Gondang	Kauman	Tulungagung	Kedungwaru	Ngantru	Karangrejo	Sendang	Pagerwojo
12	26	62	43	47	41	32	19	23	25	26	29	33	32	43	36
8	22	58	39	43	37	28	15	19	21	22	25	29	28	39	32
5	19	55	36	40	34	25	12	12	14	19	22	24	21	32	25
0	14	50	31	35	29	20	7	15	19	14	17	21	22	33	30
14	0	20	17	44	38	29	42	45	41	28	31	35	36	47	44
50	20	0	20	24	20	27	43	45	41	36	38	42	43	54	52
31	17	20	0	27	21	12	24	27	23	18	20	24	25	36	34
35	44	24	27	0	6	15	25	28	25	21	23	27	28	39	36
29	38	20	21	6	0	9	19	22	19	15	17	21	22	33	30
20	29	27	12	15	9	0	10	13	12	6	8	12	13	24	23
7	42	43	24	25	19	10	0	13	10	7	9	13	14	25	21
15	45	45	27	28	22	13	13	0	5	9	12	14	11	22	16
19	41	41	23	25	19	12	10	5	0	5	7	11	6	17	11
14	28	36	18	21	15	6	7	9	5	0	3	7	8	19	16
17	31	38	20	23	17	88	9	12	7	3	0	4	5	16	18
21	35	42	24	27	21	12	13	14	11	7	4	0	3	14	20
22	36	43	25	28	22	13	14	11	6	8	5	3	0	11	17
33	47	54	36	39	33	24	25	22	17	19	16	14	11	0	20
30	44	52	34	36	30	23	21	16	11	16	18	20	17	28	0

KONDISI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 1999-2002

	ANGKATAN KERJA				KESEMPATAN KERJA				PENGANGGURAN			
	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002
9,425	21,428	21,642	21,858	21,858	21,176	21,260	21,323	21,323	3,535	3,899	3,938	3,978
6,656	27,045	27,315	27,588	27,588	21,242	21,518	21,543	21,543	4,851	4,922	4,971	5,021
7,797	27,407	27,681	27,957	27,957	25,881	26,296	26,335	26,335	5,059	4,988	5,037	5,088
8,010	28,419	28,073	28,990	28,990	20,048	20,148	20,226	20,226	5,097	5,172	5,223	5,276
3,910	14,174	14,315	14,458	14,458	13,920	14,268	14,303	14,303	2,531	2,579	2,605	2,631
3,179	13,428	13,562	13,697	13,697	14,404	14,447	14,475	14,475	23,998	2,443	2,468	2,492
9,239	39,099	39,880	40,278	40,278	33,928	33,961	33,991	33,991	6,959	7,116	7,258	7,330
8,845	39,585	39,980	40,379	40,379	33,765	33,798	33,829	33,829	7,070	7,204	7,276	7,348
0,929	41,706	42,123	42,544	42,544	33,519	33,552	33,582	33,582	7,449	7,590	7,666	7,743
5,089	35,755	36,112	36,466	36,466	29,557	29,586	29,612	29,612	6,386	6,507	6,572	6,648
9,080	39,767	40,164	40,565	40,565	32,841	32,873	32,902	32,902	7,114	7,237	7,309	7,382
11,311	31,921	32,240	32,562	32,562	27,206	27,219	27,229	27,229	5,698	5,809	5,867	5,926
8,295	28,831	29,119	29,410	29,410	29,531	29,590	29,619	29,619	5,149	5,247	5,299	5,352
8,071	38,793	39,180	39,571	39,571	30,307	30,337	30,364	30,364	6,928	7,060	7,130	7,201
12,240	42,731	43,158	43,589	43,589	30,800	30,861	30,891	30,891	7,687	7,777	7,854	7,933
7,942	28,471	28,755	29,042	29,042	20,792	20,883	20,953	20,953	53,085	5,181	5,233	5,281
2,144	22,563	22,788	23,015	23,015	17,284	17,326	17,346	17,346	4,302	4,106	4,147	4,188
4,748	25,217	25,494	25,718	25,718	14,437	14,686	14,713	14,713	4,504	4,580	4,639	4,680
6,281	17,140	18,085	18,265	18,265	15,249	15,295	15,247	15,247	2,963	3,119	3,291	3,324
53,191	563,480	569,666	566,892	566,892	448,588	467,933	468,483	468,483	170,365	102,536	103,783	103,161

Kecamatan	Besuki	Banding	Pakel	Campurdarat
Besuki	0	4	11	
Banding	4	0	7	
Pakel	11	7	0	
Campurdarat	12	8	5	
Tg.gunung	26	22	19	
Pucanglaban	62	58	55	
Kaliawit	43	39	36	
Rejolangan	47	43	40	
Ngumit	41	37	34	
Sbr.gempol	32	28	25	
Boylangu	19	15	12	
Gondung	23	19	12	
Kauman	25	21	14	
Tulungagung	26	22	19	
Kedungaru	29	25	22	
Ngantri	33	29	24	
Karangrejo	32	28	21	
Sendang	43	39	32	
Pagetwojo	36	32	25	

Lampiran 3.

NO	KECAMATAN
1	Besuki
2	Bandung
3	Pakel
4	Campurdarat
5	Tg. Gunung
6	Pucanglaban
7	Kalidawir
8	Rejotangan
9	Ngunut
10	Sbr.Gempol
11	Boyolangu
12	Gondang
13	Kauman
14	T.Agung
15	Kedungwaru
16	Ngantru
17	Karangrejo
18	Sendang
19	Pagerwojo
	JUMLAH

50

Lampiran 4. Analisis Pertumbuhan Relatif Kota Per Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pi - Po	Pertumbuhan Relatif (%)
		1997	2001		
1	T.Agung	65.283	66.310	1.027	1.57
2	Boyolangu	66.190	69.633	3.443	5.20
3	Kedungwaru	72.228	76.673	4.445	6.15
4	Ngantru	47.572	48.567	0.995	-2.09
5	Kauman	48.224	49.507	1.283	2.66
6	Karangrejo	37.849	38.205	0.356	0.94
7	Gondang	52.986	54.441	1.455	2.75
8	Sendang	42.204	43.131	0.927	2.20
9	Pagerwojo	28.592	29.398	0.806	2.82
10	Campurdarat	47.981	50.088	2.107	4.39
11	Bandung	45.432	46.644	1.212	2.67
12	Pakel	47.275	48.845	1.570	3.32
13	T.Gunung	23.792	23.863	0.071	0.30
14	Besuki	33.039	33.963	0.924	2.80
15	Ngunut	69.898	70.977	1.079	1.54
16	Sumbergempol	59.119	61.277	2.158	3.65
17	Rejotangan	66.319	69.635	3.316	5.00
18	Kalidawir	65.239	66.622	1.383	2.12
19	Pucanglaban	22.572	23.599	1.027	4.55
	Jumlah	941.794	971.378	29.584	3.14

Lampiran 5. Perhitungan LQ Terhadap Jumlah dan Jenis Unit Usaha

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Makanan, Minuman & Tembakau

NO	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.668	0.148	4.519
2	Bandung	0.207	0.148	1.397
3	Pakel	0.000	0.148	0.000
4	Campurdarat	0.005	0.148	0.031
5	Tg. Gunung	0.000	0.148	0.000
6	Pucanglaban	0.000	0.148	0.000
7	Kalidawir	0.089	0.148	0.602
8	Rejotangan	0.374	0.148	2.527
9	Ngunut	0.042	0.148	0.286
10	Sumbergempol	0.003	0.148	0.023
11	Boyolangu	0.098	0.148	0.665
12	Gondang	0.166	0.148	1.120
13	Kauman	0.088	0.148	0.597
14	T.Agung	0.118	0.148	0.795
15	Kedungwaru	0.234	0.148	1.584
16	Ngantru	0.811	0.148	5.486
17	Karangrejo	0.047	0.148	0.314
18	Sendang	0.000	0.148	0.000
19	Pagerwojo	0.000	0.148	0.000

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

NO	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.000	0.112	0.000
2	Bandung	0.003	0.112	0.025
3	Pakel	0.009	0.112	0.078
4	Campurdarat	0.014	0.112	0.124
5	Tg. Gunung	0.000	0.112	0.000
6	Pucanglaban	0.000	0.112	0.000
7	Kalidawir	0.017	0.112	0.151
8	Rejotangan	0.010	0.112	0.090
9	Ngunut	0.019	0.112	0.171
10	Sumbergempol	0.017	0.112	0.155
11	Boyolangu	0.463	0.112	4.119
12	Gondang	0.008	0.112	0.068
13	Kauman	0.662	0.112	5.890
14	T.Agung	0.515	0.112	4.581
15	Kedungwaru	0.517	0.112	4.599
16	Ngantru	0.011	0.112	0.102
17	Karangrejo	0.116	0.112	1.035
18	Sendang	0.000	0.112	0.000
19	Pagerwojo	0.000	0.112	0.000

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Barang Kayu & Hasil hutan Lainnya

NO	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.000	0.331	0.000
2	Bandung	0.718	0.331	2.170
3	Pakel	0.947	0.331	2.863
4	Campurdarat	0.292	0.331	0.882
5	Tg. Gunung	0.091	0.331	0.275
6	Pucanglaban	0.006	0.331	0.019
7	Kalidawir	0.386	0.331	1.165
8	Rejotangan	0.192	0.331	0.580
9	Ngunut	0.385	0.331	1.163
10	Sumbergempol	0.922	0.331	2.786
11	Boyolangu	0.010	0.331	0.029
12	Gondang	0.134	0.331	0.406
13	Kauman	0.044	0.331	0.133
14	T.Agung	0.020	0.331	0.059
15	Kedungwaru	0.105	0.331	0.316
16	Ngantru	0.040	0.331	0.121
17	Karangrejo	0.058	0.331	0.176
18	Sendang	0.872	0.331	2.636
19	Pagerwojo	0.938	0.331	2.837

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Kertas & Barang Cetak

NO	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.005	0.012	0.454
2	Bandung	0.011	0.012	0.934
3	Pakel	0.009	0.012	0.733
4	Campurdarat	0.032	0.012	2.709
5	Tg. Gunung	0.045	0.012	3.799
6	Pucanglaban	0.000	0.012	0.000
7	Kalidawir	0.013	0.012	1.062
8	Rejotangan	0.015	0.012	1.266
9	Ngunut	0.008	0.012	0.643
10	Sumbergempol	0.003	0.012	0.290
11	Boyolangu	0.022	0.012	1.804
12	Gondang	0.002	0.012	0.141
13	Kauman	0.029	0.012	2.458
14	T.Agung	0.059	0.012	4.916
15	Kedungwaru	0.015	0.012	1.224
16	Ngantru	0.017	0.012	1.433
17	Karangrejo	0.035	0.012	2.915
18	Sendang	0.008	0.012	0.628
19	Pagerwojo	0.015	0.012	1.286

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Pupuk, Kimia & Barang dari Karet

NO	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.000	0.002	0.000
2	Bandung	0.000	0.002	0.000
3	Pakel	0.000	0.002	0.000
4	Campurdarat	0.000	0.002	0.000
5	Tg. Gunung	0.000	0.002	0.000
6	Pucanglaban	0.000	0.002	0.000
7	Kalidawir	0.000	0.002	0.000
8	Rejotangan	0.005	0.002	2.648
9	Ngunut	0.000	0.002	0.000
10	Sumbergempol	0.002	0.002	0.910
11	Boyolangu	0.007	0.002	3.773
12	Gondang	0.000	0.002	0.000
13	Kauman	0.000	0.002	0.000
14	T.Agung	0.005	0.002	2.571
15	Kedungwaru	0.008	0.002	4.388
16	Ngantru	0.006	0.002	2.996
17	Karangrejo	0.000	0.002	0.000
18	Sendang	0.000	0.002	0.000
19	Pagerwojo	0.000	0.002	0.000

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Semen & Barang Galian Non Logam

NO	Kecamatan	VR _i / VR	V _i / V	LQ
1	Besuki	0.310	0.294	1.055
2	Bandung	0.039	0.294	0.133
3	Pakel	0.018	0.294	0.060
4	Campurdarat	0.634	0.294	2.159
5	Tg. Gunung	0.864	0.294	2.940
6	Pucanglaban	0.969	0.294	3.298
7	Kalidawir	0.479	0.294	1.630
8	Rejotangan	0.384	0.294	1.307
9	Ngunut	0.404	0.294	1.375
10	Sumbergempol	0.043	0.294	0.148
11	Boyolangu	0.302	0.294	1.029
12	Gondang	0.470	0.294	1.600
13	Kauman	0.103	0.294	0.350
14	T.Agung	0.010	0.294	0.033
15	Kedungwaru	0.021	0.294	0.071
16	Ngantru	0.086	0.294	0.292
17	Karangrejo	0.523	0.294	1.781
18	Sendang	0.113	0.294	0.384
19	Pagerwojo	0.046	0.294	0.157

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Alat Angkutan, Mesin & Peralatan

NO	Kecamatan	VR _i / VR	V _i / V	LQ
1	Besuki	0.016	0.100	0.164
2	Bandung	0.022	0.100	0.224
3	Pakel	0.018	0.100	0.176
4	Campurdarat	0.023	0.100	0.232
5	Tg. Gunung	0.000	0.100	0.000
6	Pucanglaban	0.025	0.100	0.251
7	Kalidawir	0.017	0.100	0.170
8	Rejotangan	0.015	0.100	0.152
9	Ngunut	0.141	0.100	1.414
10	Sumbergempol	0.009	0.100	0.087
11	Boyolangu	0.098	0.100	0.986
12	Gondang	0.220	0.100	2.204
13	Kauman	0.059	0.100	0.590
14	T.Agung	0.260	0.100	2.606
15	Kedungwaru	0.100	0.100	1.007
16	Ngantru	0.023	0.100	0.229
17	Karangrejo	0.221	0.100	2.216
18	Sendang	0.000	0.100	0.000
19	Pagerwojo	0.000	0.100	0.000

LQ Jumlah & Jenis Unit Usaha Industri Barang Lainnya

NO	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.000	0.002	0.000
2	Bandung	0.000	0.002	0.000
3	Pakel	0.000	0.002	0.000
4	Campurdarat	0.000	0.002	0.000
5	Tg. Gunung	0.000	0.002	0.000
6	Pucanglaban	0.000	0.002	0.000
7	Kalidawir	0.000	0.002	0.000
8	Rejotangan	0.005	0.002	3.235
9	Ngunut	0.001	0.002	0.821
10	Sumbergempol	0.000	0.002	0.000
11	Boyolangu	0.000	0.002	0.000
12	Gondang	0.001	0.002	0.542
13	Kauman	0.015	0.002	9.421
14	T.Agung	0.015	0.002	9.421
15	Kedungwaru	0.000	0.002	0.000
16	Ngantru	0.006	0.002	3.661
17	Karangrejo	0.000	0.002	0.000
18	Sendang	0.008	0.002	4.817
19	Pagerwojo	0.000	0.002	0.000

Lampiran 6. Perhitungan LQ Tenaga Kerja Industri Kecil / Kerajinan RT

LQ TK. Makanan, Minuman & Tembakau

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.3246	0.2331	1.3928
2	Bandung	0.1459	0.2331	0.6261
3	Pakel	0.0000	0.2331	0.0000
4	Campurdarat	0.0178	0.2331	0.0762
5	Tg. Gunung	0.0000	0.2331	0.0000
6	Pucanglaban	0.0000	0.2331	0.0000
7	Kalidawir	0.0710	0.2331	0.3048
8	Rejotangan	0.3197	0.2331	1.3715
9	Ngunut	0.0682	0.2331	0.2924
10	Sumbergempol	0.0379	0.2331	0.1628
11	Boyolangu	0.2172	0.2331	0.9317
12	Gondang	0.0881	0.2331	0.3779
13	Kauman	0.0909	0.2331	0.3900
14	T.Agung	0.4698	0.2331	2.0157
15	Kedungwaru	0.4240	0.2331	1.8189
16	Ngantru	0.7685	0.2331	3.2968
17	Karangrejo	0.1229	0.2331	0.5271
18	Sendang	0.0000	0.2331	0.0000
19	Pagerwojo	0.0000	0.2331	0.0000

LQ TK Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.0000	0.2351	0.0000
2	Bandung	0.0159	0.2351	0.0676
3	Pakel	0.0247	0.2351	0.1052
4	Campurdarat	0.0109	0.2351	0.0462
5	Tg. Gunung	0.0000	0.2351	0.0000
6	Pucanglaban	0.0000	0.2351	0.0000
7	Kalidawir	0.0410	0.2351	0.1743
8	Rejotangan	0.0156	0.2351	0.0663
9	Ngunut	0.3544	0.2351	1.5072
10	Sumbergempol	0.0226	0.2351	0.0960
11	Boyolangu	0.4853	0.2351	2.0639
12	Gondang	0.0042	0.2351	0.0180
13	Kauman	0.5764	0.2351	2.4513
14	T.Agung	0.4783	0.2351	2.0342
15	Kedungwaru	0.2809	0.2351	1.1946
16	Ngantru	0.0300	0.2351	0.1277
17	Karangrejo	0.0614	0.2351	0.2612
18	Sendang	0.0000	0.2351	0.0000
19	Pagerwojo	0.0000	0.2351	0.0000

LQ TK Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.0000	0.2308	0.0000
2	Bandung	0.7109	0.2308	3.0809
3	Pakel	0.8866	0.2308	3.8421
4	Campurdarat	0.2359	0.2308	1.0224
5	Tg. Gunung	0.2162	0.2308	0.9370
6	Pucanglaban	0.0421	0.2308	0.1825
7	Kalidawir	0.3388	0.2308	1.4682
8	Rejotangan	0.1520	0.2308	0.6589
9	Ngunut	0.0617	0.2308	0.2672
10	Sumbergempol	0.8302	0.2308	3.5976
11	Boyolangu	0.0271	0.2308	0.1174
12	Gondang	0.5285	0.2308	2.2903
13	Kauman	0.0522	0.2308	0.2263
14	T.Agung	0.0045	0.2308	0.0193
15	Kedungwaru	0.0933	0.2308	0.4042
16	Ngantru	0.0989	0.2308	0.4285
17	Karangrejo	0.0762	0.2308	0.3301
18	Sendang	0.8866	0.2308	3.8423
19	Pagerwojo	0.8835	0.2308	3.8286

LQ TK Kertas & Barang Cetak

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.0039	0.0256	0.1528
2	Bandung	0.0075	0.0256	0.2923
3	Pakel	0.0082	0.0256	0.3221
4	Campurdarat	0.0158	0.0256	0.6169
5	Tg. Gunung	0.0270	0.0256	1.0556
6	Pucanglaban	0.0000	0.0256	0.0000
7	Kalidawir	0.0164	0.0256	0.6403
8	Rejotangan	0.0117	0.0256	0.4568
9	Nganut	0.0362	0.0256	1.4158
10	Sumbergempol	0.0054	0.0256	0.2117
11	Boyolangu	0.0271	0.0256	1.0580
12	Gondang	0.0006	0.0256	0.0228
13	Kauman	0.0077	0.0256	0.3022
14	T.Agung	0.0063	0.0256	0.2475
15	Kedungwaru	0.1296	0.0256	5.0639
16	Ngantru	0.0050	0.0256	0.1955
17	Karangrejo	0.0147	0.0256	0.5758
18	Sendang	0.0050	0.0256	0.1968
19	Pagerwojo	0.0291	0.0256	1.1376

LQ TK. Pupuk Kimia & Brg dari Karet

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.0000	0.0032	0.0000
2	Bandung	0.0000	0.0032	0.0000
3	Pakel	0.0000	0.0032	0.0000
4	Campurdarat	0.0000	0.0032	0.0000
5	Tg. Gunung	0.0000	0.0032	0.0000
6	Pucanglaban	0.0000	0.0032	0.0000
7	Kalidawir	0.0000	0.0032	0.0000
8	Rejotangan	0.0351	0.0032	11.1107
9	Ngunut	0.0000	0.0032	0.0000
10	Sumbergempol	0.0045	0.0032	1.4302
11	Boyolangu	0.0129	0.0032	4.0709
12	Gondang	0.0000	0.0032	0.0000
13	Kauman	0.0000	0.0032	0.0000
14	T.Agung	0.0012	0.0032	0.3648
15	Kedungwaru	0.0098	0.0032	3.1181
16	Ngantru	0.0100	0.0032	3.1705
17	Karangrejo	0.0000	0.0032	0.0000
18	Sendang	0.0000	0.0032	0.0000
19	Pagerwojo	0.0000	0.0032	0.0000

LQ TK. Semen & Barang Galian non Logam

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.6584	0.1766	3.72737
2	Bandung	0.0833	0.1766	0.47132
3	Pakel	0.0557	0.1766	0.31516
4	Campurdarat	0.7068	0.1766	4.00138
5	Tg. Gunung	0.7568	0.1766	4.28413
6	Pucanglaban	0.9123	0.1766	5.16457
7	Kalidawir	0.4973	0.1766	2.81512
8	Rejotangan	0.4152	0.1766	2.35054
9	Ngunut	0.2177	0.1766	1.23239
10	Sumbergempol	0.0678	0.1766	0.38355
11	Boyolangu	0.2057	0.1766	1.16446
12	Gondang	0.2441	0.1766	1.38206
13	Kauman	0.0677	0.1766	0.38325
14	T.Agung	0.0045	0.1766	0.02527
15	Kedungwaru	0.0276	0.1766	0.15639
16	Ngantru	0.0563	0.1766	0.31884
17	Karangrejo	0.3686	0.1766	2.08643
18	Sendang	0.1008	0.1766	0.57039
19	Pagerwojo	0.0874	0.1766	0.49467

LQ TK Alat Angkutan Mesin & Peralatan

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.0130	0.0916	0.1424
2	Bandung	0.0365	0.0916	0.3985
3	Pakel	0.0247	0.0916	0.2702
4	Campurdarat	0.0128	0.0916	0.1402
5	Tg. Gunung	0.0000	0.0916	0.0000
6	Pucanglaban	0.0456	0.0916	0.4982
7	Kalidawir	0.0355	0.0916	0.3879
8	Rejotangan	0.0331	0.0916	0.3619
9	Ngunut	0.2583	0.0916	2.8209
10	Sumbergempol	0.0316	0.0916	0.3453
11	Boyolangu	0.0248	0.0916	0.2708
12	Gondang	0.1327	0.0916	1.4495
13	Kauman	0.1470	0.0916	1.6056
14	T.Agung	0.0272	0.0916	0.2972
15	Kedungwaru	0.0347	0.0916	0.3794
16	Ngantru	0.0275	0.0916	0.3007
17	Karangrejo	0.3563	0.0916	3.8912
18	Sendang	0.0000	0.0916	0.0000
19	Pagerwojo	0.0000	0.0916	0.0000

LQ TK Barang Lainnya

No	Kecamatan	VRi / VR	Vi / V	LQ
1	Besuki	0.0000	0.0040	0.0000
2	Bandung	0.0000	0.0040	0.0000
3	Pakel	0.0000	0.0040	0.0000
4	Campurdarat	0.0000	0.0040	0.0000
5	Tg. Gunung	0.0000	0.0040	0.0000
6	Pucanglaban	0.0000	0.0040	0.0000
7	Kalidawir	0.0000	0.0040	0.0000
8	Rejotangan	0.0175	0.0040	4.3350
9	Ngunut	0.0035	0.0040	0.8762
10	Sumbergempol	0.0000	0.0040	0.0000
11	Boyolangu	0.0000	0.0040	0.0000
12	Gondang	0.0018	0.0040	0.4324
13	Kauman	0.0580	0.0040	14.3383
14	T.Agung	0.0082	0.0040	2.0280
15	Kedungwaru	0.0000	0.0040	0.0000
16	Ngantru	0.0038	0.0040	0.9278
17	Karangrejo	0.0000	0.0040	0.0000
18	Sendang	0.0076	0.0040	1.8672